

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa, karena perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui tingkat dan kualitas pendidikan serta tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu,. hal ini diebabkan mahalnya biaya pendidikan dan orang miskin memang tidak ada biaya untuk pendidikan dikarenakan, lebih mengutamakan biaya untuk makan.

Begitu pentingnya pendidikan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Para pendiri bangsa meyakini bahwa peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar (*educated people*) yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan. Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menegaskan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Setiap warga negara kaya miskin, di desa, di kota atau di manapun berada memiliki hak yang sama atas pendidikan. Dalam realitasnya, sampai saat ini dunia pendidikan masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tantangan

besar yang dihadapi di bidang pendidikan pada tahun-tahun berikutnya adalah meningkatkan akses, pemerataan, kualitas pelayanan pendidikan, dan mengoptimalkan peran serta masyarakat miskin dalam pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti layanan tingkat pendidikan SMP atau sederajat serta satuan pendidikan yang sederajat. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”¹.

Selanjutnya aturan dan bagaimana seharusnya pendidikan itu dijalankan telah diatur dan dijabarkan dalam UU sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman
3. sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional².

¹ UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1)

² UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional Bab 1 pasal 1 no 1-3

Pendidikan memiliki hakikat yang mulia yaitu memanusiaikan manusia dengan mewujudkan pribadi yang merdeka. Pribadi yang merdeka dapat terwujud dengan tiga lingkungan utama yang saling berkaitan. *Pertama*, pemerintah, dalam bentuk pendidikan formal dan hal-hal yang berhubungan dengan sekolah, kurikulum dan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan. *Kedua*, masyarakat, ini berhubungan dengan pendidikan non formal. Bentuk dari pendidikan non formal adalah seperti kelompok belajar, komunitas belajar. *Ketiga*, keluarga dan lingkungan sosial terdekat, ada yang menyelenggarakan komunitas belajar dan biasanya berkaitan dengan keagamaan, spiritual, seni, olahraga, dan keterampilan lokal. Pembelajaran dalam lingkup keluarga dan ketetanggaaan atau lingkungan terdekat ini disebut dengan pendidikan informal.

Ketiga lingkungan belajar tersebut berperan penting dalam membangun kerangka berpikir, fisik, mental, dan spiritual seseorang sehingga membentuk kepribadian dan karakter yang mandiri. Sejalan dengan tripusat pendidikan, pembinaan pendidikan masyarakat berperan dalam suatu proses di mana upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat secara nonformal dan informal.

Aturan dan acuan tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sangat jelas. Namun, dalam perjalanannya pendidikan di Indonesia 10 tahun belakangan ini, banyak pihak yang menjadi tidak mengerti dengan bentuk dan hasil yang telah tampak. Banyak pihak juga yang meragukan fungsi, peran dan arti pendidikan di Indonesia. Berbagai tingkatan sekolah telah banyak meluluskan siswa dan telah banyak pula biaya, waktu serta tenaga yang dikorbankan, tapi hasil yang dicita-citakan oleh pendidikan masih belum menemukan bentuk yang seharusnya. Hal ini dapat di lihat, masih banyak para lulusan sekolah yang nampaknya “diluluskan” artinya siswa yang lulus tersebut tidak banyak memiliki ilmu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Bahkan tidak banyak lulusan yang

siap untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, dengan berbagai faktor alasan. Salah satu faktor adalah ketidakmampuan dalam bidang ekonomi, pada akhirnya para lulusan tidak dapat bekerja menurut ilmu dan pengalaman pendidikan yang ada. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pendidikan yang telah ada tidak mampu mengusahakan peserta didik menjadi manusia berguna sebenar-benarnya bagi kepuasan dan kebahagiaan hidupnya. Berguna sebenar-benarnya bagi kepuasan dan kebahagiaan hidupnya akan tampak selama peserta didik berada di sekolah, di sekolah, peserta didik merasa nyaman, dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pendidikan, sesuai dengan keadaan kemampuan dan tidak merasa terpisah dari dirinya, keluarganya, masyarakat dan lingkungan yang lebih luas.

Pendidikan yang dijalankan seharusnya sesuai dengan arah minat, kebutuhan, kemampuan dan kesiapan anak serta tingkat kemampuan ekonomi keluarga, seperti yang pernah dikemukakan oleh Nandita pada poin tujuh bahwa kualitas pendidikan relatif rendah dan belum mampu memenuhi kompetensi peserta didik. Pengabaian arah minat kebutuhan dan kesiapan anak dalam hal kompetensi yang dimiliki peserta didik akan menghasilkan peserta didik yang tidak mengenal dirinya dan tidak mengetahui arti pendidikan yang telah ditempuhnya. Sistem pengajaran seperti *sistem drill* yaitu pendidikan melalui sistem hafalan yang verbalistis serta aktivitas-aktivitas belajar mekanis di kelas seharusnya tidak diterapkan. sistem pendidikan harus memberikan kemerdekaan anak didik dalam melakukan dan menenukan berbagai hal untuk mengasah dan mempertegas jati dirinya sebagai insan pembelajar. Sistem pendidikan seperti ini akan menjadikan peserta yang puas dan berkembang sesuai dengan kondisi atau keadaan keluarganya.³

Sistem pendidikan yang kurang memperhatikan kepuasan siswa tidak terlepas dari unsur kemampuan seseorang dalam menjalani pendidikan tersebut. Kemampuan yang dimaksud adalah

³ Ustama, D.J., 2007, Pendidikan sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa, Jakarta : Prenadamedia

kemampuan untuk memenuhi tuntutan pendidikan. Seseorang akan dapat memenuhi tuntutan pendidikan apabila didukung oleh kemampuan ekonomi keluarga. Artinya semakin tinggi kemampuan ekonomi keluarga maka akan semakin mendekatkan dirinya dengan kepedulian pada pendidikan. Kemampuan ekonomi memang bukan faktor terbesar yang mempengaruhi kepedulian seseorang dalam pendidikan, tapi dengan tidak memperhatikan atau bahkan menghilangkan kemampuan ekonomi keluarga pendidikan juga tidak dapat berjalan dengan baik.

Kemampuan ekonomi keluarga akan berpengaruh pada keadaan dan minat keluarga tersebut dalam memaksimalkan arti penting pendidikan dan belajar. Theodore W. Schultz, berpendapat, ini berarti ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan pendidikan, pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi pertama.⁴ Masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah (masyarakat miskin) tidak akan mampu mengikuti tuntutan pendidikan. Kenyataannya tuntutan pendidikan tidak memperhatikan tingkat kemampuan masyarakat miskin. Sekolah yang memberikan pendidikan yang bermutu atau berkualitas selalu berbiaya mahal. Biaya mahal inilah yang menjadi kendala utama masyarakat miskin, pada akhirnya masyarakat miskin hanya menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang jauh dari kata kualitas. Kualitas yang dimaksud adalah kualitas pendidik, kualitas sarana dan prasarana, kualitas pendalaman kurikulum, kualitas pengembangan arah minat dan bakat siswa.

Sistem pendidikan yang lebih menghargai keadaan dan mengembangkan minat, kemampuan, kebutuhan dan kesiapan anak daripada kemampuan ekonomi keluarga, maka menurut Wasty Soemanto kaidah penting bagi dunia pendidikan yaitu :

1. Negara kita berdasarkan Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pendidikan sebagai tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Negara, berdasarkan pandangan hidup bangsa yang menjunjung asas demokrasi. Dalam

⁴ Theodore W. Schultz, 1961, *investment of Human Capital, the american economic review*, vol 51, mar, 1961

hubungan itu, maka dalam batas-batas tertentu demokratisasi di bidang pendidikan diharapkan dapat diakui dan dilaksanakan. Demokrasi dalam pendidikan sangat diharapkan untuk diterapkan, teristimewa di dalam proses belajar di sekolah.

2. Seiring dengan harapan yang pertama di atas, maka pendidikan hendaknya berlangsung secara psikologis. Hal ini disebabkan karena pendidikan diselenggarakan untuk anak didik. Jadi dalam pendidikan, perhatian utama ditujukan kepada anak didik. Setiap aspek pelayanan pendidikan diperuntukan bagi terwujudnya aktivitas belajar yang efektif, maka pendidikan hendaknya psikologis. Pendidikan yang psikologis dalam arti bahwa pendidikan itu berorientasi kepada sifat dan hakikat anak didik sebagai manusia yang berkembang⁵.

Pendidikan tidak hanya proses transfer ilmu dari seseorang ke seseorang, tapi yang perlu dipahami dalam pendidikan adalah bagaimana transfer tersebut dilakukan, dengan cara apa transfer dilakukan, siapa yang mentransfer, siapa yang menerima transfer tersebut. Selanjutnya arti penting pendidikan adalah pengajaran dan proses belajar mengajar. Keputusan-keputusan yang bijaksana dalam proses belajar mengajar tidaklah tercipta begitu saja. Keputusan-keputusan harus berdasarkan bukti penelitian tentang strategi-strategi pembelajaran yang efektif, teori-teori yang kokoh mengenai bagaimana anak belajar dan berkembang serta *assesment* berkelanjutan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang telah dimiliki tiap-tiap siswa pada saat itu dan yang dapat dilakukannya⁶.

Pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus utamanya telah dan akan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan ketrampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Pendidikan yang dijalankan dengan baik akan mempertimbangkan

⁵ Wasty Soemanto, 2006, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta

⁶ Ormrod, J. E. 2008, *Psikologi Pendidikan*, hal 6, Jakarta: Erlangga

kemampuan dan keadaan masyarakat yang akan mengikuti pendidikan tersebut. Pertimbangan ini perlu dilakukan, karena tidak semua lapisan masyarakat dapat mengikuti pendidikan.

Krisis global semakin membuat kehidupan yang sudah sulit menjadi semakin rumit bahkan telah menjadi suatu dilema dan masalah klasik yang tidak pernah kunjung selesai. Permasalahan yang kian nampak dan semakin menjadi-jadi adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dirasakan oleh mereka. Terkait dengan kemiskinan ini, publikasi dari BPS tanggal 2 Juli 2014, menyebutkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2007 mencapai 37,17 juta jiwa (16,58 persen). Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin bulan Maret 2006 yang berjumlah 39,30 juta jiwa (17,75 persen). Badan Pusat Statistik memperkirakan, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 mencapai 234,2 juta jiwa atau naik dibanding jumlah penduduk 2000 yang mencapai 205,1 juta jiwa.⁷ Dari data jumlah penduduk tersebut angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi.

Badan Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas menginformasikan, jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini mencapai 31 juta jiwa (data ini masih menjadi perdebatan karena BPS dinilai telah memanipulasi data jumlah penduduk miskin). Sebanyak 78 persen di antaranya hidup di daerah Jawa dan Sumatera⁸. Memang jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Angka-angka tersebut adalah manifestasi dari kemiskinan yang berbanding lurus dengan tingkat pendidikan penduduk suatu negara. Kemiskinan itu pula yang menyebabkan sebagian masyarakat di negara ini lebih mengedepankan urusan pangan untuk bertahan hidup daripada memikirkan bagaimana

⁷ Kompas, 22 Juni 2010, Menggagas Organisasi Pendidikan Masa Depan, halaman 3.

⁸ Detik.com

untuk membayar sekolah. Sehingga sudah dapat dipastikan masyarakat akhirnya terus terpuruk dalam belenggu kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan kemanusiaan purba. Ia bersifat laten dan aktual sekaligus, ia telah ada sejak peradaban manusia ada dan hingga kini masih menjadi masalah sentral di belahan bumi manapun. Kemiskinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan lainnya, seperti keterbelakangan, kebodohan (kurangnya pendidikan), ketelantaran, kematian dini, permasalahan buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (*human trafficking*) tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti kebijakan dan program yang telah dilakukan dan tekah pula diterapkan, dana yang di keluarkan demi menanggulangi kemiskinan. Tak terhitung berapa kajian dan ulasan telah dilakukan di universitas, hotel berbintang, dan tempat lainnya⁹. Pertanyaannya: mengapa kemiskinan masih menjadi bayangan buruk wajah kemanusiaan bangsa hingga saat ini?, sudahkah pendidikan yang diterapkan selama ini sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat miskin?.

Kenyataannya adalah penerapan pendidikan selama ini masih bersifat penyamarataan pada setiap kalangan masyarakat. Penyamarataan yang dimaksud adalah semua hal yang berhubungan dengan kepemilikan dan penerapan sistem pembelajaran. Pendidikan menjadi komoditas perdagangan. Pendidikan menjadi komoditas yang diperjualbelikan dengan maksud mendapatkan keuntungan pada penjualnya. Akibat dari penyamarataan ini tidak meningkatkan minat dan kemampuan belajar pada masyarakat miskin. Artinya masyarakat miskin tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan gambaran kehidupannya, tidak selaras dengan tingkat kemampuan dan tidak sejalan dengan yang diinginkan dalam gambaran konstruk kehidupannya dan pada akhirnya masyarakat miskin mengikuti pendidikan sebagai syarat formalitas sebagai manusia yang

⁹ Suharto, Edi. 2009, *Kemiskinan dan perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.

berpikir namun miskin akan misi dan kualitas. Namun pada masyarakat yang tidak miskin mendapatkan pendidikan yang terasa lebih. Oleh karena itu, model pendidikan penyamarataan ini harus dicarikan solusi yang berupa model pendidikan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat miskin, agar masyarakat miskin dapat merasakan nikmatnya mengenyam pendidikan.

Akibat lain dari penerapan sistem ini, masyarakat miskin tidak akan mampu menempuh pendidikan yang sebenar-benarnya. Masyarakat miskin akan menempuh pendidikan apa adanya dan mengikuti pendidikan dengan ala kadarnya. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Maka wajar, masyarakat miskin banyak yang tetap miskin, karena, tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan keadaan dirinya sehingga pada akhirnya masyarakat miskin tidak dapat mengoptimalkan kemampuan dirinya, karena tidak ditopang oleh kemampuan berpikir yang memadai. Kemampuan berpikir akan meningkat apabila seseorang mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Hasil penyamarataan dalam suatu usaha memang perlu dan dapat dilakukan, namun mengedepankan hasil tanpa melihat bagaimana, siapa dan apa yang akan dihasilkan tentu hasil tersebut hanya dapat diikuti oleh golongan tertentu saja terutama masyarakat yang tidak miskin. Seharusnya pendidikan yang diterapkan dapat diminati dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Munculnya *home schooling*, adalah salah satu contoh bahwa untuk kalangan tertentu berada dibangku sekolah menjadi tidak menarik. Tentunya untuk kalangan masyarakat miskin harus ada model atau bentuk yang dapat diterapkan. Penerapan ini tentunya untuk mewujudkan amanat UUD 1945. Oleh karena itu,

diperlukan suatu model atau bentuk pendidikan yang dapat diminati oleh kalangan masyarakat miskin. Untuk sampai pada model pendidikan yang sesuai dengan keadaan masyarakat miskin, tentu perlu ada kajian mendalam tentang apa sebenarnya konstruk realitas sosial masyarakat miskin tentang pendidikan tersebut,

Keadaan pendidikan yang tidak memperhatikan kondisi masyarakat miskin, tentu akan menimbulkan suatu konstruk dalam diri masyarakat miskin. Konstruk yang dimaksud adalah sebuah konstruk sosial tentang suatu gambaran dan penilaian tentang pendidikan yang dilihat selama ini, masyarakat miskin akan membuat konstruk dirinya yang berhubungan dengan pendidikan. Konstruk tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan pada pemahaman masyarakat miskin tentang pendidikan. Konstruk realitas sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan (*a claim*) dan juga sebuah sudut pandang (*a viewpoint*) bahwa kandungan dari kesadaran dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat¹⁰. Konstruk realitas sosial masyarakat miskin terbentuk dari realitas yang dilihat dan dirasakan tentang pendidikan. Konstruk tersebut tentu dihubungkan antara kondisi riil dirinya dengan pendidikan sebagai suatu keharusan yang juga harus dijalani. Dalam ilmu psikologi konstruk adalah konsep yang digunakan untuk menginterpretasikan atau menterjemahkan dunia atau lingkungan. Konstruk merupakan konsep yang digunakan individu dalam menafsirkan, mengategorisasikan, dan mempetakan tingkah laku. Upaya mengkonstruksi persamaan dan perbedaan sesuatu membimbing ke arah pembentukan suatu konstruk¹¹. Pada intinya individu

¹⁰ Charles R. Ngangi, Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial, *Jurnal ASE* – Volume 7 Nomor 2, Mei 2011: hal 1 - 4

¹¹ Kelly menggunakan kata Konstruk untuk merujuk kepada ide atau kategori yang digunakan orang untuk menginterpretasi dunia mereka. Akan tetapi, Kelly mengeksplorasi proses kognitif tertentu yang menjadi alat individu untuk mengkategorikan orang atau benda dan mengkonstruksi makna dari peristiwa harian setiap individu secara mendetail. Orang-orang mengaplikasikan konstruk mereka terhadap interpretasi peristiwa sehari-hari melalui prosedur mental yang umumnya disebut “proses kognitif”. Kelly meyakini bahwa tidak ada kebenaran yang objektif

membuat prediksi dan membuat pertimbangan perubahan yang lebih jauh dalam sistem-sistem konstruk realitas sosial. Masyarakat miskin mendasarkan perubahan yang ada pada situasi sosial mengarah pada prediksi yang akurat atau tidak.

Pekanbaru adalah salah satu kota tujuan (migrasi) bagi pendatang dari daerah lain yang bertetangga dengan kota Pekanbaru, seperti dari provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi dan Bengkulu serta daerah lainnya di Pulau Sumatera. Perdebatan yang berkembang di tengah masyarakat dan media massa bahwa salah satu penyebab rendahnya tingkat pendidikan di Riau khususnya di perkotaan adalah masih banyaknya masyarakat miskin di kota Pekanbaru. Hal lain ditambah dengan banyaknya pendatang ke kota Pekanbaru. Para pendatang tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan dikategorikan miskin. Rata-rata penduduk miskin yang datang ke Pekanbaru berjumlah 2.429 orang setiap tahunnya. Data ini mendekati asumsi di media terutama para pejabat yang mengatakan bahwa kemiskinan di Riau khususnya Pekanbaru disebabkan oleh migrasi. Asumsi ini juga harus dibandingkan dengan jumlah pendatang yang tidak miskin atau yang menyebabkan bergerakinya perekonomian di Kota Pekanbaru¹².

Salah satu daerah yang menjadi tempat atau tujuan untuk bertempat tinggal adalah kecamatan Tampan. Kecamatan Tampan memiliki luas 108,84 km², pada tahun 2001 berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Jumlah penduduk kecamatan Tampan 140.662, untuk kepadatan 1.292 jiwa/ km². Sedangkan data tahun 2010 warga Kecamatan Tampan sudah berjumlah 190 ribu (tambah kata jiwa). Laju pertumbuhan penduduk terbesar di Kota Pekanbaru terdapat di Kecamatan Tampan yakni sebesar 6,94 persen, jumlah sedemikian menunjukkan bahwa sebenarnya sebagian besar dari penambahan penduduk yang terjadi bukan disebabkan pertumbuhan alami, melainkan karena migrasi (perpindahan

dan kebenaran yang mutlak absolut. Fenomena yang terjadi hanya berarti manakala dihubungkan dengan cara individu mengkonstruk fenomena yang ada

¹² Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau tahun 2014

penduduk). Kecamatan ini memiliki empat kelurahan yakni Kelurahan Simpang Baru, Tuah Karya, Sidomulyo Barat dan Delima¹³.

Data yang didapat dari kantor Camat Tampan bahwa gambaran bahwa empat kelurahan di kecamatan Tampan yaitu kelurahan Tuah Karya adalah daerah yang paling padat jumlah penduduknya yaitu sebanyak 54.955 jiwa (pria = 16.673, wanita 15.780) dengan tingkat kepadatan tiap km 3108. Data kecamatan Tampan dari aspek pendidikan dan budaya bahwa dari data statistik tersebut bahwa pendidikan di kecamatan Tampan pada penduduk usia 7-12, yakni usia pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sangat tinggi (Kantor Camat Tampan). Data mengenai tingkat ekonomi masyarakat Tampan khususnya Kelurahan Tuah Karya. Dari segi budaya, penduduk Kecamatan Tampan sangat heterogen, karena merupakan tujuan para pendatang suku Batak, Minang, Melayu, Jawa, Bugis dan lainnya. Dari aspek agama juga heterogen yaitu terdapat agama Islam, Kristen Budha, dan Hindu.

Selanjutnya data dan keadaan kecamatan Tampan kota Pekanbaru, juga mengisyaratkan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan yang dilakukan pemerintah selama ini belum efektif dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin, khususnya program yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan. Model pendidikan yang diterapkan selama ini belum mampu meningkatkan minat dan kepercayaan masyarakat miskin untuk mengikuti pendidikan yang berkualitas kurang maksimal. Pemerintah kurang memperhatikan pendidikan untuk semua (*education for all*) bukanlah pendidikan penyamarataan tanpa memperhatikan dari masyarakat seperti apa peserta didiknya¹⁴.

¹³ *ibid*

¹⁴ Abdul Azis El Quusy, Ilmu Jiwa: Prinsip-Prinsip dan Implementasinya dalam Pendidikan (Jilid 3), Penerbit, Bulan Bintang tt

Kurangnya minat masyarakat miskin untuk sekolah di sekolah yang berkualitas, bukan berarti masyarakat miskin tidak mau mendapat pendidikan, tapi masyarakat miskin menganggap bahwa pendidikan yang dijalankan selama ini tidak sesuai dengan kondisi atau keadaannya. Pendidikan yang dijalankan selama ini tidak sesuai konstruksinya tentang pendidikan. Apabila seseorang menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan konstruk dirinya, maka seseorang akan menjalaninya tidak akan dapat maksimal. Hasilnya tentu tidak akan banyak berpengaruh positif bagi peningkatan kapasitas dirinya. Seperti diketahui pendidikan yang dijalani dengan baik akan mampu meningkatkan cara berpikir dan cara hidup yang baik dan terarah. Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat ekonominya.

Faturochman dan Ambar Widaningrum berpendapat bahwa dalam lingkungan sosial yang miskin, kebanyakan orang memiliki pendidikan yang rendah. Pemilihan ini tidak terlepas dari hasil konstruksinya pada realitas sosial yang berhubungan dengan pendidikan¹⁵. Konstruk tersebut akan mengarahkan perilakunya dalam menjalani pendidikan tersebut. Dalam ilmu psikologi kepribadian dijelaskan bahwa konstruk yang dimiliki dapat mengembangkan rumus-rumus alternatif teoritis tentang fenomena, menafsirkan dan mengkonstruksikan lingkungannya. Selanjutnya kehidupan yang dijalani merupakan representasi atau konstruksi dari kenyataan untuk menciptakan kembali dirinya sendiri. Alat kelengkapan sistem konstruk individu dilengkapi dengan kebebasan untuk mengambil keputusan dan keterbatasan bertindak, Seseorang tidak membuat pilihan di luar alternatif-alternatif yang didapatkan.

¹⁵ Faturochman dan Ambar Widaningrum, tt, Pendidikan untuk "Kaum Kecil, *Makalah*, menjelaskan pendidikan yang rendah. Mereka sering belum melek huruf atau putus sekolah Dengan kata lain, mereka paling tinggi tamat pendidikan dasar. Kesempatan untuk pendidikan lanjutan hampir tidak ada. Dimasa sekarang, keadaan selalu cepat berubah dan terus menerus berubah. Taraf pendidikan yang sangat rendah pada umumnya berkaitan dengan informasi dan pengertian yang serba terbatas

Apabila dihubungkan dengan kondisi masyarakat miskin, maka konstruk realitas sosialnya berhubungan dengan dua hal utama yaitu konstruk tentang kehidupan ekonomi dan konstruk yang berhubungan dengan pendidikan. Kedua konstruk tersebut tidak terpisah. Realitas sosial masyarakat miskin yang berhubungan dengan ekonomi adalah lebih banyak mengkonsentrasikan dirinya pada pemenuhan ekonomi keluarga, sedangkan realitas sosial yang berhubungan dengan pendidikan adalah pendidikan tidak memihak pada keadaan dan kemampuan masyarakat miskin. Konstruk pada kedua realitas sosial tersebut akan secara langsung mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam melihat hubungan antara kemampuan ekonomi dengan tuntutan pendidikan. Kondisi demikian, segala arah sikap dan perilakunya tidak akan jauh dari konstruk yang dimiliki termasuk bagaimana kesempatan atau sukses juga serba terbatas.

Pendidikan yang dirasakan masyarakat miskin apabila dikaitkan dengan skala prioritas yang dimiliki masyarakat miskin, maka masyarakat miskin dihadapkan pada suatu permasalahan hidup yang cukup rumit¹⁶. Pada satu sisi mereka harus memenuhi tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga pada sisi lain harus meningkatkan pendidikan anak agar anak kelak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Inilah konstruk realitas sosial masyarakat miskin. Dilema pada dua sisi ini akan memberikan gambaran pada diri masyarakat miskin, konstruk seperti apa yang dimiliki masyarakat miskin tentang pendidikan. Dilema yang dihadapi masyarakat miskin ini tidak mudah, karena dua sisi tersebut sebenarnya penting, namun seseorang akan sulit memfokuskan konsentrasinya pada satu sisi. Inilah yang menjadi menarik untuk diteliti dan dikaji untuk menjawab seperti apa gambaran konstruk masyarakat miskin tentang pendidikan.

Melihat fenomena dan gambaran latar belakang, bahwa masyarakat miskin memiliki suatu konstruk sosial tentang keadaan

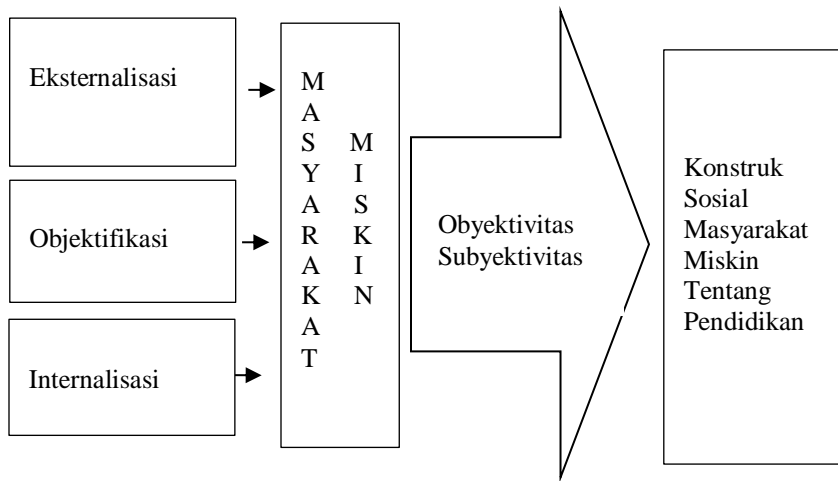
¹⁶ Manfaat pendidikan juga dapat dilihat sebagai nilai tambah yang diperoleh seseorang karena mendapat pendidikan tertentu. Nilai tambah secara umum merupakan peningkatan derajat, harkat, dan martabat seseorang. Secara khusus dipandang sebagai peningkatan kemampuan berpikir, bersikap dan berperilaku, dan keterampilan.

kehidupan dan pendidikan. Konstruk ini muncul dari berbagai hal, di antaranya adalah kenyataan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak memenuhi tuntutan pendidikan. Akhirnya, masyarakat miskin memiliki kecenderungan akan selalu berada digaris kemiskinan. Jadi, peneliti ingin menemukan apa dan bagaimana konstruk realitas sosial masyarakat miskin tentang pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang ada maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah bahwa masyarakat miskin lebih memfokuskan diri pada pemenuhan ekonomi keluarga daripada pendidikan anak. Pendidikan yang sudah disediakan oleh pemerintah dan swasta belum mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk dapat sekolah dengan baik sampai kejenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga dari masyarakat miskin untuk sekolah di sekolah yang lebih berkualitas. Dengan demikian maka rumusan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruk realitas sosial masyarakat miskin tentang kemiskinan?
2. Bagaimana konstruk realitas masyarakat miskin tentang pendidikan?



Gambar 1: Rumusan masalah Penelitian

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengenai bagaimana konstruk realitas sosial masyarakat miskin tentang pendidikan. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk meneliti dan mengkaji bagaimana konstruk realitas sosial masyarakat miskin tentang kemiskinan?
2. Untuk meneliti dan mengkaji bagaimana konstruk realitas sosial masyarakat miskin tentang pendidikan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya studi tentang psikologi pendidikan dan psikologi sosial yakni konstruk realitas sosial masyarakat miskin terkait dengan masalah kemiskinan dan pendidikan.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan psikologi pendidikan Islam yakni yang berhubungan dengan pendidikan dan masyarakat miskin. Pendidikan sesuatu yang diperintahkan oleh agama Islam

dan masyarakat miskin adalah golongan yang diwajibkan untuk dibantu dalam bentuk bimbingan dan pengajaran dalam hal pendidikan

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat miskin khususnya untuk dapat berperan aktif menyumbangkan pemikiran-pemikiran mereka guna pengembangan pendidikan bagi diri sendiri.
- b. Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru juga diharapkan dapat memperoleh manfaat berupa peningkatan kajian pendidikan dari sudut pandang psikologi yang selama ini jarang dilakukan oleh pemerintah, sehingga menciptakan suatu pola atau bentuk pendidikan yang dapat berguna bagi masyarakat miskin serta kemandirian masyarakat dan mengedepankan peran masyarakat miskin dalam hal pendidikan.

E. Penelitian Terdulu

1. Penelitian Tentang Kemiskinan

Penelitian tentang masyarakat miskin yang penulis ketahui sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan dari berbagai cabang ilmu, baik psikologi, sosiologi, antropologi, pendidikan, komunikasi yang pada umumnya dilakukan dari bidang ilmu sosial.

Penelitian-penelitian yang dimaksud tersebut di antaranya adalah penelitian Ketut Sudhana Astika, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Bali. Hasil penelitiannya adalah Kebudayaan kemiskinan merupakan adaptasi dan penyesuaian oleh sekelompok orang pada kondisi marginal mereka, tetapi bukan untuk eksistensinya karena sejumlah sifat dan sikap mereka lebih banyak terbatas pada orientasi kekinian dominannya sikap

rendah diri, apatis, dan sempitnya pada perencanaan masa depan¹⁷.

Hasil penelitian Nano Prawoto tentang strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan: seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain; untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan; melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan; strategi pemberdayaan. Untuk menunjang keberhasilan strategi tersebut, diperlukan unsur-unsur berikut. Upaya tersebut sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, lintas sektor, dan sesuai dengan kondisi dan budaya lokal; memberikan perhatian terhadap aspek proses, tanpa mengabaikan hasil akhir dari proses tersebut; melibatkan dan merupakan hasil proses dialog dengan berbagai pihak dan konsultan dengan segenap pihak yang berkepentingan terutama masyarakat miskin; meningkatkan kesadaran dan kepedulian di kalangan semua pihak yang terkait menyediakan ruang gerak yang seluas-luarnya bagi munculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat; Pemerintah dan pihak lainnya bergabung menjadi kekuatan yang saling mendukung¹⁸.

Hasil penelitian Marwanti, tentang model pemberdayaan masyarakat miskin melalui program *life skills* berbasis potensi daerah terintegrasi dengan pemberantasan buta aksara dapat dipakai sebagai alternatif model pemberdayaan karena dapat meningkatkan kualitas pembelajaran keaksaraan maupun pelatihan *life skills* itu sendiri. Model ini efektif diterapkan karena dapat meningkatkan antusiasme dan motivasi peserta

¹⁷ Ketut Sudhana Astika, Budaya Kemiskinan Di Masyarakat Tinjauan Kondisi Kemiskinan Dan Kesadaran Budaya Miskin Di Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. I No. 01, Tahun 2010

¹⁸ Nano Prawoto, Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya, *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* Volume 9, Nomor 1, April 2009: 56 - 68

didik karena peserta memperoleh baik kemampuan pedagogis maupun ekonomis.¹⁹

Kemudian, penelitian oleh Junaidi Tarwiyanto, hasil dari penelitian ini adalah kemiskinan dapat dilihat dari kegagalan pemenuhan hak dasar yaitu kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kemudian kemiskinan karena individualisme, ketersediaan jenis-jenis pangan, kekayaan materi, Ketidaksetaraan, nilai penting pendidikan formal, ketersediaan barang, mekanisme penyelesaian konflik tradisional, partisipasi politik dan hak menentukan diri sendiri²⁰.

Raihana Kaplale, hasil penelitian disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan pada rumah tangga di Dusun Kranjang Desa Waiyame dan Desa Waiheru adalah (a) menurunnya produktivitas tanaman, (b) lapangan kerja yang sulit didapat, (c) rendahnya tingkat pendidikan kepala keluarga, (d) ketergantungan masyarakat terhadap alam dan kondisi yang ada, (e) biaya dalam proses ritual adat, (f) terbatasnya akses terhadap modal (uang tunai)²¹.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Sinnathurai Vijayakumar, Kesimpulan dari penelitian ini adalah Variabel seperti pendidikan (EDU), kerja industri (IND), akses ke pasar (MAR), fasilitas jalan (ROD). memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan di sektor real. ROD, MAR dan EDU memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan menekankan kebutuhan untuk perbaikan besar dalam infrastruktur dan pendidikan di sektor riil. Sesuai Temuan

¹⁹ Marwanti, dkk Prapti Karomah, Sri Sumardiningih, Muniya Alteza dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program *Life Skills* Berbasis Potensi Daerah Terintegrasi Dengan Pemberantasan Buta Aksara Berwawasan Gender Di Kabupaten Bantul

²⁰ Junaidi Tarwiyanto, Studi tentang kemiskinan dan persepsi masyarakat di kota Pagar Alam, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, volume 8, nomor 4, bulan November tahun 2010

²¹ Raihana Kaplale, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di kota ambon (study kasus di dusun kranjang desa waiyame kec. Teluk Ambon dan desa Waiheru kec. Teluk Ambon Baguala kota Ambon), *Jurnal Agribisni Kepulauan* Volume 1 No. 1 Oktober 2012, 101 – 115

dari studi ini, untuk mengurangi kemiskinan melalui mengambil langkah-langkah perbaikan yang sesuai dengan keadaan manusia dan pembangunan yang mendukung untuk kesejahteraan masyarakat²².

2. Penelitian Tentang Kemiskinan dan Pendidikan

Penelitian tentang masyarakat miskin dan pendidikan diantaranya dilakukan oleh Ahmad Syaifuddin, Adapun hasil penelitiannya adalah ada perbedaan *gain score* (skor *posttest* dikurangi skor *pretest*) yang signifikan antara kelompok eksperimen (masyarakat miskin) dan kelompok kontrol (masyarakat miskin). *Gain score* kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Oleh karena itu, dapat menjadi salah satu alternatif yang bisa dikembangkan oleh sekolah untuk mengoptimalkan kekuatan diri pada keluarga miskin (*personal strengths*) para siswa ber-SSE Renda²³.

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Pongtuluran & Theresia K. Brahim, hasil penelitian tersebut adalah tentang pendidikan berbasis masyarakat (*Community Based Education*) intinya adalah bahwa masyarakat yang menentukan kebijakan serta ikut berpartisipasi di dalam menanggung beban pendidikan, bersama seluruh masyarakat setempat, tentang pendidikan yang bermutu bagi anak-anak mereka. Dalam pengertian ini, masyarakat tidak semestinya menyerahkan seluruh pendidikan anak-anak mereka kepada sekolah semata-mata, tetapi ikut memikirkan serta bertanggungjawab bersama kalangan pendidikan akan berhasilnya pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian diharapkan akan tercipta hubungan

Sinnathurai Vijayakumar, BrezinovaOlga (2012),. Kemiskinan dan Penentu dalam sektor real di Sri Langka, *Journal of Competitiveness*

²³ Ahmad Syaifuddin dengan judul kemiskinan dan pendidikan keluarga miskin, *Jurnal Ekonomika* volume 6, Nomor 1, Juli 2012: 25- 42

yang harmonis di antara pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah serta pendidikan di luar sekolah²⁴.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Omomiya, MBI, hasil penelitian tersebut adalah pendidikan dalam setiap arti adalah salah satu faktor fundamental mencapai berkelanjutan ekonomi pembangunan melalui investasi dalam modal manusia. Pendidikan menumbuhkan pemahaman diri, meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan produktivitas masyarakat dan kreativitas serta kewirausahaan dan kemajuan teknologi. Selain itu pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam mengamankan kemajuan ekonomi dan sosial sehingga meningkatkan distribusi pendapatan yang mungkin akan menyelamatkan orang-orang dari kemiskinan²⁵.

Joyce Chege Komote Adung`o Stephen Mwangi E. Wairimu Lawrence Njoroge, dalam penelitiannya yang berjudul Pendidikan dan Pengentasan kemiskinan di Kenya: menginterogasi yang hilang. Pengentasan kemiskinan adalah yang paling dasar tujuan pembangunan. Sebagian besar intervensi dalam pendidikan ditujukan untuk memerangi kemiskinan di samping meningkatkan tingkat melek huruf di masyarakat. Dalam tujuan pembangunan milenium 2015, pengentasan kemiskinan dan pencapaian pendidikan dasar untuk semua ditunjukkan sebagai tujuan pertama dan kedua masing-masing adalah jelas indikator bahwa tujuan kembar penting baik dalam proses dan realisasi pembangunan. Tugas yang tetap yang belum diselidiki adalah sejauh mana pendidikan bertindak sebagai sopir menuju pengentasan kemiskinan²⁶.

²⁴ Aris Pongtuluran & Theresia K. Brahim, Pendekatan Pendidikan Berbasis Masyarakat, *Jurnal Pendidikan Penabur* - No.01 / Th.I / Maret 2012

²⁵ Omoniyi, MBI (2013), *Journal of Arts dan Ilmu Sosial* 2046-9578, Vol.15 No.II (2013 @British Journal Publishing, Ins, 2013

²⁶ Joyce Chege Komote Adung`o Stephen Mwangi E. Wairimu Lawrence Njoroge (2013) *International Journal of Humaniora dan Ilmu Sosial* Vol. 5, No. 1; Januari 2015

Tentang penelitian konstruk realitas sosial masyarakat miskin tentang pendidikan penulis belum menemukannya. Penelitian terkait yang penulis temukan adalah tentang Konstruk Sosial Dalam Realitas Sosial yang ditulis oleh Charles R. Ngangi. Hasil penelitian tersebut adalah manusia dalam berinteraksi akan membuat dan menggunakan simbol-simbol, hal ini oleh Berger dan Luckmann diistilahkan *externalization*. Pada saat teresternalisasi, simbol-simbol menjadi terobjektifikasi, maksudnya bahwa simbol itu kemudian menjadi perantara manusia untuk berinteraksi, simbol mempunyai keberadaanya dan suatu makna yang penting yang kemudian menjadi independen dari pencipta aslinya²⁷.

F. Kerangka Teoritis

1. Konstruk Realitas Sosial

a. Pengertian Konstruk Realitas Sosial

Istilah konstruk atas realitas sosial (*social construction of reality*) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge*. Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Teori konstruk sosial, sejatinya dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoretis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan²⁸.

Konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi dari Italia, ia adalah cikal bakal konstruktivisme. Sejauh ini ada tiga macam konstruktivisme yakni konstruktivisme radikal, realisme

²⁷ Charles R. Ngangi, *Konstruk Sosial Dalam Realitas Sosial*, *Jurnal ASE* – Volume 7 Nomor 2, Mei 2011: hal 1 – 4

²⁸ Peter L. Buerger and Thomas Luckman, 1990, *The Social Construction of Reality, A Treatise in The Sociological of Knowledge*, (terjemahan) Hasan Basri, Jakarta, LP3ES

hipotesis, dan konstruktivisme biasa. Adapun pengertian dari ketiga konstruktivisme tersebut adalah:

1. *Konstruktivisme radikal* hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita. Bentuk itu tidak selalu representasi dunia nyata. Kaum konstruktivisme radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan bagi mereka tidak merefleksi suatu realitas ontologisme obyektif, namun sebuah realitas yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Pengetahuan selalu merupakan konstruk dari individu yang mengetahui dan tidak dapat ditransfer kepada individu lain yang pasif karena itu konstruk harus dilakukan sendiri olehnya terhadap pengetahuan itu, sedangkan lingkungan adalah saran terjadinya konstruk itu.
2. *Realisme hipotesis*, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki.
3. *Konstruktivisme biasa* mengambil semua konsekuensi konstruktivisme dan memahami pengetahuan sebagai gambaran dari realitas itu. Kemudian pengetahuan individu dipandang sebagai gambaran yang dibentuk dari realitas objektif dalam dirinya sendiri²⁹

Dari ketiga macam konstruktivisme, terdapat kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada, karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Kemudian individu membangun sendiri realitas yang dilihatnya itu berdasarkan struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, yang oleh Baron dan Byrne disebut dengan istilah *skema* dalam ilmu psikologi. Skema merupakan suatu kerangka mental yang

²⁹ N Hidayat, *Konstruk Sosial Industri Penyiaran : Kerangka Teori Mengamati Pertarungan di Sektor Penyiaran*, Makalah dalam diskusi “UU Penyiaran, KPI dan Kebebasan Pers, di Salemba 8 Maret 2003

berpusat pada tema-tema spesifik yang membantu seseorang untuk mengorganisasikan dan menggunakan informasi sosial. Skema juga merupakan seperangkat tatanan struktur pengetahuan atau pemahaman mengenai beberapa konsep atau stimulus. Skema berisi pengetahuan tentang konsep atau stimulus, relasi antar berbagai pemahaman tentang konsep dan contoh-contoh spesifiknya³⁰. Skema dapat berupa skema tentang orang tertentu, peran sosial atau diri sendiri, sikap terhadap obyek tertentu, *stereotype* tentang kelompok tertentu, atau persepsi tentang kejadian umum.

Konstruktivisme macam inilah yang oleh Berger dan Luckmann disebut dengan konstruk sosial. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya³¹. Manusia dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya melalui respon terhadap stimulus dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

Konstruk sosial memiliki arti yang khusus dalam ilmu sosial khususnya psikologi sosial dan psikologi kepribadian. Dalam psikologi sosial ada teori yang disebut dengan teori kognisi sosial. Kognisi sosial adalah cara kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Kognisi sosial berfungsi secara otomatis, cepat, tanpa usaha dan tanpa penalaran yang cermat atau logis, karena telah ada skema yang membimbing. Pada psikologi kepribadian ada teori yang disebut *personal construct*

³⁰ Baron, R.A & Byrne, D., 2002. *Social Psychology. Understanding Human Interaction*. Boston: Allyn & Bacon, Inc.

³¹ Alex Sobur, 2012 *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung : Remaja Rosdakarya

*theory*³². Konstruk personal yang dikembangkan oleh George Kelly dinyatakan dalam satu asumsi dasar dan dielaborasi oleh sebelas *corollaries* yang menyatakan bahwa “*A person’s processes are psychologically channelized by the way in which he anticipates events* (Proses seseorang secara psikologis dijumpai oleh cara orang tersebut mengantisipasi peristiwa-peristiwa). Terdapat kata kunci dalam kalimat tersebut, yaitu:

1. *A person’s processes are psychologically channelized* mengindikasikan bahwa manusia mengarahkan proses mereka pada suatu jalur, suatu tujuan, atau akhir.
2. *Anticipates events* yaitu manusia mampu mengantisipasi peristiwa, mengarahkan tindakan mereka sesuai dengan prediksi mereka atas masa depan.

Dalam kehidupan seseorang biasanya dihubungkan pada pengaruh sosial dalam pengalaman hidup individu. Asumsi dasarnya pada tiga teori yaitu kognisi sosial, konstruk personal dan konstruk realitas sosial sama yaitu realitas. Realitas adalah konstruksi sosial, yang dalam istilah ilmu Sosiologi yang dikembangkan oleh Berger dan Luckmann disebut dengan konstruk realitas sosial. Selanjutnya dikatakan bahwa konstruksi sosial memiliki beberapa kekuatan, yaitu:

1. Peran sentral bahasa memberikan mekanisme konkret, dalam hal ini budaya mempengaruhi pikiran dan tingkah laku individu.
2. Konstruksi sosial dapat mewakili kompleksitas dalam satu budaya tunggal, hal ini tidak mengasumsikan keseragaman.
3. Bersifat konsisten dengan masyarakat dan waktu. Selanjutnya, konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan (*a claim*) dan juga sebuah sudut pandang (*a viewpoint*) bahwa kandungan dari kesadaran, dan cara

³² Pervin, Lawrence A dkk. 2010. *Kepribadian: Teori dan Penelitian Edisi 9*. Jakarta: Kencana

berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat.³³.

Pemahaman terhadap sesuatu bisa terjadi akibat adanya komunikasi seseorang dengan orang lain. Realitas sosial sesungguhnya tidak lebih dari sekedar hasil konstruk sosial dalam komunikasi tertentu.

b. Konsep Teoritis Konstruk Realitas Sosial

Berger & Luckman berpandangan bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial, dalam pengertian individu-individu dalam masyarakat itulah yang membangun masyarakat. Maka pengalaman individu tidak terpisahkan dengan masyarakatnya. Berger memandang manusia sebagai pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui tiga momen dialektis yang simultan yaitu eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi³⁴.

Eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia nyata, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai produk manusia (*society is a human product*).

Objektivikasi adalah hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu berupa realitas objektif yang hadir dalam wujud yang nyata. Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*society is an objective reality*), atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.

³³ Charles R. Ngangi., Konstruk Sosial Dalam Realitas Sosial *Jurnal ASE*, Volume 7 Nomor 2, Mei 2011: 1 – 4

³⁴ Peter L. Buerger and Thomas Luckman, 1990, *The Social Construction of Reality, A Treastise in The Sociological of Knowledge*, (terjemahan) Hasan Basri, Jakarta, LP3ES

Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat (*man is a social product*). Eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi adalah tiga dialektis yang simultan dalam proses reproduksi.

Secara berkesinambungan individu adalah agen sosial yang mengeksternalisasi realitas sosial. Pada saat yang bersamaan, pemahaman akan realitas yang dianggap objektif pun terbentuk. Pada akhirnya, melalui proses eksternalisasi dan objektifikasi, individu dibentuk sebagai produk sosial. Sehingga dapat dikatakan, tiap individu memiliki pengetahuan dan identitas sosial sesuai dengan peran institusional yang terbentuk atau yang diperankannya.

Jika ditelaah terdapat beberapa asumsi dasar dari teori konstruk sosial Berger dan Luckmann. Adapun asumsi-asumsinya tersebut adalah:

- a. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruk sosial terhadap dunai sosial di sekelilingnya
- b. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan
- c. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus³⁵

Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik.

³⁵ Stephen W. Littlejohn, 2001, *Theories of Human Communication*, Seventh Edition, USA, Wadsworth Publishing Company

Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara objektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subjektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya.

Proses konstruksinya, jika dilihat dari perspektif teori Berger & Luckman berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept*, yakni *subjective reality*, *symbolic reality* dan *objective reality*. Selain itu juga berlangsung dalam suatu proses dengan tiga momen simultan, eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Objective reality*, merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.
- b. *Symbolic reality*, merupakan semua ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai "*objective reality*" misalnya teks produk industri media, seperti berita di media cetak atau elektronika, begitu pun yang ada di film-film.
- c. *Subjective reality*, merupakan konstruk definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif

berpotensi melakukan objektivikasi, memunculkan sebuah konstruk *objective reality* yang baru³⁶.

Memahami dunia sosial yang sudah diobjektivasikan dan menghadapinya sebagai suatu aktivitas di luar kesadaran, belum dapat dikatakan sebagai suatu internalisasi. Proses internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Macam-macam unsur dari dunia yang diobjektivasikan akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil masyarakat.

Berger setuju dengan pernyataan fenomenologis bahwa terdapat realitas berganda daripada hanya suatu realitas tunggal. Berger bersama dengan Garfinkel berpendapat bahwa ada realitas kehidupan sehari-hari yang diabaikan, yang sebenarnya merupakan realitas yang lebih penting. Realitas ini dianggap sebagai realitas yang teratur dan terpola, biasanya diterima begitu saja dan non problematis, sebab dalam interaksi-interaksi yang terpola realitas sama-sama dimiliki orang lain. Akan tetapi, berbeda dengan Garfinkel, Berger menegaskan realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi-dimensi subjektif dan objektif.³⁷ Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia mempengaruhi melalui proses internalisasi (yang mencerminkan realitas subjektif)³⁸. Dalam mode yang dialektis, terdapat *tesa*, *anti tesa* dan *sintesa*. Berger melihat masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat.

Realitas objektif masyarakat miskin adalah kekurangan kepemilikan harta kekayaan dan tingkat pendidikan yang rendah

³⁶ Wibowo, JAP, 2014, *Konstruk Realitas Berita Kekerasan Terhadap Perempuan*, Laporan Penelitian, UNS Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

³⁷ Poloma, M. M., 2010, *Sosiologi Kontemporer*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

³⁸ *ibid*

dan terbatasnya interaksi sosial. Berger dan Luckman mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang spesifik³⁹. Ada pemisahan antara kepemilikan harta kekayaan dan tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya interaksi sosial dengan bagaimana masyarakat tersebut hidup dalam realitasnya dan hal tersebut tidak dapat diserap secara sempurna. Maka anak dan orang tua akan menginternalisasi pernafsirannya terhadap realitas tersebut. Anak dan orang tua pada masyarakat memiliki perbedaan dalam memandang realitas dan itu bisa dianggap sebagai cermin dari dunia objektif. Anak yang dari keluarga miskin, tetapi anak tersebut juga akan menyerap yang diberikan oleh orang tuanya. Indikator realitas objektif tersebut seperti kelas, suku, agama dan variabel-variabel lainnya. Pernyataan ini menjelaskan, ada perbedaan antara realitas obyek pada masyarakat miskin itu sendiri ada nada perbedaan antara masyarakat miskin dengan tidak miskin.

Berger dan Luckman menguraikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi awal yang dialami individu pada saat kecil, saat dikenalkan pada dunia sosial objektif. Individu berhadapan dengan orang yang sangat berpengaruh (orang tua atau pengganti orang tua), dan bertanggung jawab terhadap sosialisasi anak⁴⁰. Batasan realitas yang berasal dari orang lain yang sangat berpengaruh itu dianggap oleh si anak sebagai realitas objektif.

Soetandyo Wignjosoebroto, menyatakan bahwa “realitas” dalam artinya sebagai sesuatu yang menampak sebenarnya adalah

³⁹ Peter L. Buerger and Thomas Luckman, 1990, *The Social Construction of Reality, A Treastise in The Socioligical of Knowledge*, (terjemahan), Hasan Basri, Jakarta, LP3ES

⁴⁰ *ibid*

fakta, namun dalam maknanya yang tidak hanya sebagai sesuatu (*being*) yang disadari, diketahui, atau bahkan yang dipahami dan diyakini (*realized*) boleh dan ada di dalam alam pemikiran manusia. Maka yang namanya realita itu tak mesti berhenti pada konsep realitas sebagai realitas individual, melainkan realitas yang menjadi bagian dari kesadaran, pengetahuan, dan/atau keyakinan suatu kelompok sosio-kultural. Keyakinan suatu kelompok sosio-kultural inilah yang dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial disebut realitas sosial, sekalipun yang dimaksud dan ditunjuk sebagai kelompok sosiokultural hanya kelompok kecil saja, malah mungkin hanya terdiri dari dua individu yang tengah berintegrasi saja⁴¹.

2. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Karakteristik masyarakat dalam kehidupan digambarkan dalam dua bentuk, yaitu kaya dan miskin. Miskin yang merupakan lawan dari kaya banyak didefinisikan pada konsep ekonomi yaitu ketiadaan atau kekurangan harta benda serta ketidakmampuan mencukupi kebutuhan hidupnya. Pendefinisian kemiskinan pada konsep ekonomi tidak sepenuhnya salah, karena konsentrasi pada definisi tersebut lebih kepada pemenuhan kebutuhan jasmani dan biologis. Seperti pendapat WIS Mukti kata miskin diberi arti tidak berharta benda⁴².

Selanjutnya Soedarsono menjelaskan kemiskinan sebagai struktur tingkat hidup yang rendah, mencapai tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibanding dengan standar hidup umumnya berlaku dalam

⁴¹ Soetandyo Wignjosoebroto. 2001. Fenomena cq Realitas Sosial sebagai Obyek Kajian Ilmu (Sains) Sosial. Dalam Burhan Bungin (ed). Metode Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologi ke arah Ragam Varian Kontemporer. Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

⁴² Safi'I, 2010, Ampih Miskin, Model kebijakan Penuntasan Kemiskinan dalam Perspektif Teori dan Praktek, AAverroes Press.

masyarakat⁴³. Kemudian World Bank tahun 2001 juga mendefinisikan kemiskinan sebagai ketercabutan dari kehidupan yang layak. Miskin adalah keadaan kelaparan, kurang tempat tinggal, kurang sandang dan kurang pendidikan. Menurut defenisi ini, orang menjadi miskin bukan karena kelemahan mereka, namun karena hal itu terjadi diluar kendali mereka. Biasanya, karena kebijakan yang buruk dari institusi negara atau masyarakat yang tidak memperhatikan suara mereka⁴⁴.

Houghton dan Khandker mengaitkan kemiskinan dengan kurangnya kesejahteraan. Menurut pendapat ini kemiskinan lebih berorientasi keuangan karena secara konvensional mengaitkan kesejahteraan dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat diartikan sebagai masyarakat yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat dirinya berada di atas ambang minimal kategori sejahtera⁴⁵.

Dalam perspektif yang lain kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata miskin diartikan sebagai tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Sedangkan fakir diartikan sebagai orang yang sangat miskin.

⁴³ Sudarsono, 2012, Realitas Kemiskinan di pedesaan, Rineka cipta

⁴⁴ Hendra R. 2010, Determinan Kemiskinan, Makalah, F.E. Universitas Indonesia

⁴⁵ Houghton dan Khandker, 2012, Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan, Jakarta : Penertbit Salemba Empat

Kemiskinan merupakan masalah yang umum disemua negara dan memiliki substansi yang bersifat universal sehingga banyak ahli yang menyatakan kemiskinan sebagai sebuah budaya, namun derajat kemiskinan antara satu negara dengan negara lain bahkan antara satu daerah dengan daerah lain memiliki perbedaan⁴⁶. Danglova tidak secara tegas menyebutkan kemiskinan sebagai sebuah budaya, namun diakui bahwa terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dipelajari oleh generasi berikutnya antara lain bergantung kepada mata pencaharian informal, tidak memiliki tabungan, tidak memiliki kemampuan investasi, tinggal di tempat yang kumuh atau bahkan tidak memiliki rumah, pendidikan rendah, malas, cenderung senang mengkonsumsi minuman beralkohol (mabuk) dan kualitas pangan yang kurang gizi. Secara politis, masyarakat miskin cenderung kurang memiliki partisipasi.

Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 10 mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Kemiskinan meliputi dimensi politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap asset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci/membatasi. Kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat.

Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit, kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak

⁴⁶ Danglova, 2008, Behavioral of Arbitration Acceptability, *International Journal of Conflict Management*, Vol.11, No.3, 2000, 249-266

memiliki rasa bebas. Ciri masyarakat miskin adalah: (1) tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka (politik), (2) tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada (sosial), (3) rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan (ekonomi), (4) terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme (budaya dan nilai), (5) rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, afeksi, keamanan, identitas kultural proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi dan waktu luang⁴⁷.

Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendefinisikan kemiskinan adalah kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makannya kurang dari 2100 kilo kalori perkapita per bulan. BKKBN mendefinisikan. Kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2 kali sehari, tidak memiliki pakaian yang berbeda di rumah dan diluar rumah, bagian terluas rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Pengertian keluarga miskin ini didefinisikan lebih lanjut menjadi : (1) paling kurang sekali sekali seminggu keluarga makan daging/ ikan/ telur, (2) Setahun sekali seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru, (3) luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni,

Beberapa definisi kemiskinan yang disertai dengan kriteria garis kemiskinan yang digunakan saat ini sehingga mengakibatkan perbedaan strategi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan, semuanya tergantung dari definisi yang digunakan.

⁴⁷ Danglova, 2008, Behavioral of Arbitration Acceptability, *The International Journal of Conflict Management*, Vol.11, No.3, 2000, 249-266

b. Kemiskinan Menurut Islam

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Swt. menggunakan istilah itu dalam firman-Nya: yang artinya “atau orang miskin yang sangat fakir” (QS al-Balad [90]: 16). Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: *al-faqr*, berarti membutuhkan (*al-ihtiyaj*). Allah Swt. berfirman: “...lalu dia berdoa, “Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku” (QS al-Qashash [28]:24).

Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjannya disebut sebagai orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan. Perbedaan kategori ini tepat untuk menjelaskan pengertian dua pos *mustahiq* zakat, yakni *al-fuqara* (orang-orang fakir) dan *al-masakin* (orang-orang miskin), sebagaimana firman-Nya dalam QS at-Taubah [9]: 60.⁴⁸

Dalam ayat ini, menurut Syarif, memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh⁴⁹. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Allah Swt. Berfirman dalam surat al Baqarah ayat 233, yang artinya “Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”. Kemudian dalam surat Ath Talaaq ayat yang artinya “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan kemampuanmu” (QS ath-Thalaaq [65]:6).

⁴⁸ Hanna Djumhana, 2003, Membangun Kepribadian Dinamis, *Makalah*, Simposium Psikologi Islami di Surakarta, hal 3

⁴⁹ Syarif, 2003, Psikologi Qur'ani, Bandung : Pustaka Hidayah,

Dalam hadist, Islam juga menerangkan tentang pengertian kemiskinan. Rasulullah saw. bersabda: “Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan” (HR Ibnu Majah).

Dari ayat dan hadist di atas dapat di pahami bahwa tiga perkara (yaitu sandang, pangan, dan papan) tergolong pada kebutuhan pokok (primer), yang berkait erat dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan miskin berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia, oleh karena itu Islam menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman yang bisa dihembuskan oleh setan, sebagaimana firman Allah Swt. “Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan” (QS al- Baqarah [2]:268). Dengan demikian, siapa pun dan di mana pun berada, jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer), yaitu sandang, pangan, dan papan, dapat digolongkan pada kelompok orang-orang yang fakir ataupun miskin.

Jika tolak ukur kemiskinan Islam dibandingkan dengan tolak ukur lain, maka akan didapati perbedaan yang sangat mencolok. Tolak ukur kemiskinan dalam Islam memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dari tolak ukur lain. Sebab, tolak ukur kemiskinan dalam Islam mencakup tiga aspek pemenuhan kebutuhan pokok bagi individu manusia, yaitu pangan, sandang, dan pangan. Adapun tolak ukur lain umumnya hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pangan semata.

Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta, yang dilihat dari kacamata dan (tambah kara dari) sudut mana pun seharusnya mendapat pengertian yang sesuai dengan realitasnya. Sayang peradaban Barat kapitalis, pengemban sistem ekonomi kapitalis, memiliki gambaran dan fakta tentang kemiskinan yang berbeda-beda. Mereka menganggap bahwasannya kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan atas barang ataupun jasa

secara mutlak. Kebutuhan berkembang seiring dengan berkembang dan majunya produk-produk barang ataupun jasa, masyarakat miskin menganggap usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan atas barang dan jasa itu pun mengalami perkembangan dan perbedaan.

Dari banyak pendapat dapat di simpulkan bahwa kemiskinan sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi saja, tetapi lebih dalam dan luas lagi berkaitan dengan yang non material. Kemiskinan yang berkaitan dengan ekonomi atau material seperti uang, perhiasan, tanah, rumah, alat elektronik, alat transportasi dan yang lain yang berhubungan dengan harta benda. Sedangkan kemiskinan non material adalah yang berhubungan dengan kekurangan pendidikan, kekurangan kesehatan, kekurangan kebebasan hak politik, sosial, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kehidupan yang layak sebagai manusia.

Maksud dari kemiskinan material dan non material dapat juga didefinisikan kemiskinan dalam dua bentuk yaitu *pertama* kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. *Kedua*, kemiskinan sukraela dan kemiskinan terpaksa⁵⁰. Kemiskinan absolut adalah sejumlah masyarakat yang hidup di bawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Kemiskinan relatif adalah suatu kondisi kehidupan seseorang sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar, namun masih jauh dibawah keadaan masyarakat pada umumnya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan yang dapat dilihat dari pemenuhan makan sehari-hari, kelayakan tempat tinggal dan tidak terpenuhinya kebutuhan pakaian yang layak pakai, serta rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki.

⁵⁰ *Ibid*

c. Tolak Ukur Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh golongan miskin, melainkan karena ketidakmampuan menghindar mereka walaupun dengan mempergunakan seluruh kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan tercermin dari sikap dan tingkah laku antara lain menerima keadaan diri sebagai kenyataan yang tidak dapat diubah, sumber daya manusia yang rendah, produktivitas rendah, lemahnya nilai tukar hasil produksi, keterbatasan kepemilikan modal, pendapatan keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan⁵¹.

Cerminan tingkah laku di atas saling berkaitan seakan-akan membentuk jaring laba-laba yang terhubung satu sama lain dan menjadi perangkap. Apabila seseorang terbelit dalam perangkap laba-laba kemiskinan, maka mereka akan jatuh dalam ketidakberdayaan dan menjadi semakin miskin. Sebagai contoh seseorang dengan pendapatan rendah akan menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang diperolehnya dan diperoleh keluarganya, disamping itu juga berdampak pada rendahnya derajat kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya akan menyebabkan rendahnya produktivitas dan berdampak semakin turunnya tingkat pendapatan seseorang⁵².

Terbentuknya kaitan faktor-faktor ekonomi menyebabkan masyarakat cenderung menilai bahwa kemiskinan lebih disebabkan ketidakmampuan seseorang dalam mengelola dan meningkatkan produktivitas ekonomi yang dimilikinya. Modal atau aset nyata baik berwujud harta benda kepemilikan maupun simpanan dan aset maya, semisal

⁵¹ Dicky Djatnika Utama, 2007, Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik

⁵² Sutianto, Anen. 2004. *Reaktualisasi Masyarakat Madani Dalam Kehidupan*. Pikiran Rakyat: Bandung.

kepemilikan informasi, pengetahuan dan pengalaman, tidak dapat produktif sehingga tidak memberi andil guna meningkatkan pendapatan keluarga.

Masyarakat miskin memiliki kecenderungan menyimpan aset yang kurang memiliki produktivitas tinggi. Aset yang sering disimpan masyarakat miskin berujud perhiasan dan peralatan elektronik yang sewaktu-waktu jika dibutuhkan dapat segera diuangkan. Pola perilaku tersebut terus berlangsung dan seolah dilestarikan. Pola-pola perilaku tersebut seakan menjadi budaya masyarakat miskin.

Lewis dan Shweder mengasumsikan perilaku tersebut sebagai salah satu budaya kemiskinan dalam aktivitas perekonomian. Secara rinci Shweder menyebutkan bahwa perilaku miskin ditandai dengan pekerjaan informal sebagai mata pencaharian, rendahnya kemampuan berhemat, rendahnya kepercayaan antar individu terlebih yang tidak dikenal, ketidakmampuan orientasi masa depan termasuk didalamnya perencanaan dan perilaku tertentu guna investasi ekonomi dan perbaikan taraf pendidikan⁵³.

Beberapa isu utama dalam pembahasan kemiskinan adalah bagaimana menentukan atau membuat sebuah tolak ukur sebuah masyarakat dikategorikan miskin atau tidak miskin. Houghton dan Khandker membuat tiga langkah yang perlu diambil dalam mengukur sebuah kemiskinan, yaitu :

1. Menentukan indikator kesejahteraan
2. Menetapkan standar minimal yang dapat diterima.
Indikator tersebut untuk memisahkan antara masyarakat miskin dan masyarakat tidak miskin

⁵³ Tood Lucas, 2008, Cultural And Evolutionary Components Of Marital Satisfaction, A Multidimensional Assessment Of Measurement Invariance, *Journal of Cross-Cultural Psychology*, Vol 33 No.5, 464-481

3. Membuat rangkuman statistik untuk menggabungkan informasi dari distribusi indikator kesejahteraan yang berkaitan dengan garis kemiskinan⁵⁴

Permasalahan dalam menentukan kemiskinan adalah kalau memakai 3 langkah di atas adalah tentu tidak bisa diterapkan disetiap negara atau daerah. kemiskinan merupakan masalah yang umum disemua negara dan memiliki substansi yang bersifat *universal* sehingga banyak ahli yang menyatakan kemiskinan sebagai sebuah budaya, namun derajat kemiskinan antara satu negara dengan negara lain bahkan antara satu daerah dengan daerah lain memiliki perbedaan⁵⁵. Danglova tidak secara tegas menyebutkan kemiskinan sebagai sebuah budaya, namun diakui bahwa terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dipelajari oleh generasi berikutnya antara lain bergantung kepada mata pencaharian informal, tidak memiliki tabungan, tidak memiliki kemampuan investasi, tinggal di flat yang kumuh atau bahkan tidak memiliki rumah, pendidikan rendah, malas, cenderung senang mengonsumsi minuman beralkohol (mabuk) dan kualitas pangan yang kurang gizi. Secara politis, masyarakat miskin cenderung kurang memiliki partisipasi.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa terdapat tolak ukur yang berbeda terhadap derajat kemiskinan suatu wilayah tertentu. Meskipun demikian, sebagai sebuah realitas sosial kemiskinan dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dilakukan masyarakat setempat.

Perbedaan tolak ukur terhadap kemiskinan biasanya disebabkan terdapatnya perbedaan perbandingan alat ukur. Umumnya, kemiskinan ditentukan atas dasar standar kehidupan yang harus dipenuhi oleh masyarakat suatu negara.

⁵⁴ Shahidur R. Khandker, 2010, Handbook on Impact Evaluation, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW Washington DC

⁵⁵ Danglova, 2008, Behavioral of Arbitration Acceptability, *the International Journal of Conflict Management*, Vol.11, No.3, 2000, 249-266

Apabila seseorang berada di bawah garis standar hidup normal, individu tersebut digolongkan miskin. Namun dalam menentukan standar hidup yang berhubungan kebutuhan sandang, pangan dan papan terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara lain bahkan satu kelompok dengan kelompok lain⁵⁶.

Oleh sebab itu, upaya pengukuran kemiskinan akan mendekati sempurna manakala digunakan beberapa tolak ukur secara bersama-sama untuk dapat digunakan sebagai perbandingan. Namun karena kemiskinan merupakan realitas sosial, maka pendekatan yang menggunakan kaidah ilmu-ilmu sosial hendaknya diutamakan⁵⁷.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pengukuran kemiskinan akan mendekati kebenaran jika dikaji dari kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat miskin. Kebiasaan hidup yang didefinisikan sebagian ahli sebagai budaya kemiskinan antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan termasuk didalamnya jumlah anak putus sekolah, rendahnya tingkat partisipasi (apatis) dalam penataan wilayah dan aktivitas sosial kemasyarakatan, rendahnya kemampuan dan kehendak menabung serta berinvestasi, malas, gemar mengkonsumsi minuman beralkohol, orientasi kepuasan sesaat, tinggal di rumah kumuh, bekerja disektor informal dan memiliki penghasilan dibawah upah minimum wilayah tersebut, fatalistik atau percaya bahwa kemiskinan adalah sebuah kodrat, deprivasi sosial yang diterima, kualitas pangan, cenderung menyalahkan situasi (*low self awareness*) dan perilaku-perilaku menyimpang termasuk gangguan mental dan perilaku pada anak-anak.

Biro Pusat Statistik menggunakan batas garis kemiskinan berdasarkan data konsumsi dan pengeluaran komoditas pangan dan non pangan. Komoditas pangan terpilih

⁵⁶ Danglova, 2008, Behavioral of Arbitration Acceptability, *The International Journal of Conflict Management*, Vol.11, No.3, 2000, 249-266

⁵⁷ ibid

terdiri dari 52 macam, sedangkan komoditas non pangan terdiri dari 27 jenis untuk kota dan 26 jenis untuk desa. Garis kemiskinan yang telah ditetapkan BPS dari tahun ketahun mengalami perubahan. Menurut Indonesian Nutrition Network (INN) tahun 2003 adalah Rp 96.956 untuk perkotaan dan Rp 72.780 untuk pedesaan⁵⁸.

Kemudian menteri sosial menyebutkan berdasarkan indikator BPS garis kemiskinan yang diterapkannya adalah keluarga yang memiliki penghasilan di bawah Rp 150.000 perbulan. Bahkan Bappenas yang sama mendasarkan pada indikator BPS tahun 2005 batas kemiskinan keluarga adalah yang memiliki penghasilan di bawah Rp 180.000 perbulan.

Dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program bantuan langsung tunai (BLT) BPS telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin, seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.

⁵⁸ Badan Pusta Statistik (BPS) Propinsi Riau tahun 2014

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya⁵⁹.

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau kekeluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (*social distinction*) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (garis kemiskinan) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk⁶⁰.

Ukuran kemiskinan menurut Haughton, J dkk, secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian:

⁵⁹ Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, tahun 2014

⁶⁰ Maslach, C., & Leiter, M.P. 2008. Early predictor of job burnout and engagement. *Journal of Applied Psychology*, Vol.93, No. 3, 498-512

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (*poverty line*) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis Kemiskinan (*poverty line*) adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada defenisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan abosolut ini bisa diartikan dari melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin.

World Bank menghitung garis kemiskinan absolut dengan menggunakan pengeluaran konsumsi yang dikonversi ke dalam PPP (*Purchasing Power Parity/ Paritas Daya Beli*). Tujuannya adalah untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan⁶¹.

Pendapatan perkapita yang tinggi sama sekali bukan merupakan jaminan tidak adanya kemiskinan absolut dalam jumlah yang besar. Hal ini mengingat besar atau kecilnya porsi atau bagian pendapatan yang diterima oleh kelompok-kelompok penduduk yang paling miskin tidak sama untuk masing-masing negara, sehingga mungkin saja suatu negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi justru mempunyai persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan internasional yang lebih besar dibandingkan dengan suatu negara yang pendapatan per kapitanya lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut antara lain struktur pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di negara

⁶¹ Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Riau tahun 2014

yang bersangkutan, berbagai pengaturan politik dan kelembagaan yang dalam prakteknya ikut menentukan pola distribusi pendapatan nasional.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok penduduk. Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada besarnya perbedaan antara 20 atau 10 persen masyarakat paling bawah dengan 80 atau 90 persen masyarakat lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya memperkecil perbedaan antara masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dan mereka yang makmur dalam setiap dimensi statifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan⁶².

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. Kenyataannya, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin seperti pernah dilaporkan oleh Stephen W. Littlejohn⁶³. Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (*official figure*) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia

⁶² Haughton, J, 2012, Handbook On Proverty inequality, The World Bank, hlm 68

⁶³ Stephen W. Littlejohn, 2001, Theories of Human Commnication, Seventh Edition, USA, Wadsworth Publishing Company, hal, 127

(negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia.

World Bank mengelompokkan penduduk kedalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk⁶⁴.

Dalam penelitian ini kriteria tersebut diatas akan disesuaikan dengan kriteria atau karakteristik daerah kota Pekanbaru yang dikeluarkan ketenatuannya oleh BPS provinsi Riau yaitu ada 14 (empat belas) kriteria masyarakat dikategorikan miskin seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan keterangan yang ditulis oleh BPS bahwa Untuk mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama⁶⁵.

Dalam hal ini BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi keebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Masyarakat miskin adalah yang memiliki rata-rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Riau tahun 2014

memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

d. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan sangat beragam bergantung pada kondisi demografis, sosiografis dan geopolitik. Comms yang dikutip oleh Ahmada menyebutkan bahwa faktor penyebab kemiskinan terkait dengan penduduk, perumahan dan pekerjaan. Ini berarti bertambahnya jumlah penduduk, semakin tumbuhnya pemukiman yang tidak terkendali dan kesempatan kerja yang terbatas karena pendidikan yang rendah⁶⁶.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan beberapa hal yaitu:

1. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin
2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga
3. Penyebab sub-budaya (subkultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
4. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi
5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial⁶⁷

⁶⁶ Rustanto, Bambang, 2015, Menangani Kemiskinan, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, hal. 73

⁶⁷ Astika,, K., S. Budaya Kemiskinan Di Masyarakat : Tinjauan Kondisi Kemiskinan Dan Kesadaran Budaya Miskin Di Masyarakat *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. I No. 01, Tahun 2010, hal, 23 - 35

Secara lebih spesifik ada beberapa faktor lain yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz, yaitu :

1. Pendidikan yang terlampau rendah
Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.
2. Sikap malas bekerja
3. Keterbatasan sumber alam
4. Terbatasnya lapangan kerja
5. Keterbatasan modal
6. Beban keluarga⁶⁸

Kaplale juga mengemukakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan keadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penganiayaan manusia terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya:

1. Keengganan bekerja dan berusaha,
2. Kebodohan,
3. Motivasi rendah,
4. Tidak memiliki rencana jangka panjang,
5. Budaya kemiskinan, dan
6. Pemahaman keliru terhadap kemiskinan⁶⁹.

Mardianto mengemukakan bahwa, kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, diantaranya yaitu :

⁶⁸ Hartono dan Aziz, Kemiskinan di Indonesia (Fenomena dan Fakta), *sarulmardianto.wordpress.com*

⁶⁹ Kaplale, R. 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kota Ambon, *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan*, Vol 1 No. 1 Oktober 2012

1. Rendahnya Taraf Pendidikan
2. Rendahnya Derajat Kesehatan
3. Terbatasnya Lapangan Kerja
4. Kondisi Keterisolasian⁷⁰

Menurut Sharp et al, kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu:

1. Rendahnya kualitas angkatan kerja.
2. Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal.
3. Rendahnya masyarakat terhadap penguasaan teknologi.
4. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien.
5. Tingginya pertumbuhan penduduk⁷¹.

Untuk kasus Indonesia diperkirakan ada empat faktor penyebab kemiskinan. Faktor tersebut yaitu: rendahnya taraf pendidikan, rendahnya taraf kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan kondisi keterisolasian. Keempat masalah tersebut tidak hanya dialami oleh Indonesia tapi juga dialami oleh negara berkembang lainnya. Keempat permasalahan tersebut bisa berdiri sendiri atau ada saling keterkaitan satu sama lain.

3. Konsep Tentang Pendidikan

a. Pendidikan Menurut Islam

Pendidikan dalam Islam lebih banyak dikenal dengan menggunakan istilah *al tarbiyah*, *al ta`lim*, dan *al ta`dib*. Dari ketiga istilah tersebut yang populer dan sering digunakan adalah *al tarbiyah* bahkan dijadikan salah satu fakultas di perguruan tinggi Islam. Setiap terminologi tersebut mempunyai makna yang berbeda satu sama lain, karena perbedaan teks dan konteks kalimatnya. Persamaan dari ketiga konsep tersebut terletak kesesuaian dalam pengertian pendidikan dan pengajaran.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Endri. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 13 No. 1 Hal. 1-13.

Namun ada perbedaan substansial dari istilah *al tarbiyah*, *al ta'lim* dan *a; ta'dib*⁷².

Istilah pertama adalah *at tarbiyah* yang berasal dari suku kata *rabba* yang memiliki pengertian dasar tumbuh, berkembang, memelihara, merawat, mengatur, menjaga kelestarian dan eksistensinya. Selanjutnya kata *at tarbiyah* berasal dari tiga kata yaitu *rabba*, *yarbu* berarti bertambah, tumbuh dan berkembang, *rubiya yarba* yang berarti menjadi besar. Yang terakhir adalah *rabba yarubbu* yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun dan memelihara serta mengasahi. Firman Allah dalam surat al Isra' ayat 24, yang artinya "... dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah *mendidik* aku waktu kecil". Kata *rabb* mempunyai arti yang berkonotasi dengan term *tarbiyah* dan *mrabbi*. Berdasarkan istilah tersebut ada yang menafsirkan bahwa Allah SWT adalah pendidik yang Maha Agung bagi seluruh alam. Kata *rabbi* dalam al Qur'an dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 224 kali disebutkan. Kata ini diartikan sebagai pengembangan, peningkatan, ketinggian dan kelebihan serta perbaikan.⁷³

Abdurahaman al Nahlawi, mengartikan tarbiyah dalam empat pengertian. *Pertama* memelihara, yakni memelihara fitrah anak sebagai manusia. Fitrah menurut Mubarak menyebutkan fitrah dengan potensi, yang berarti sesuatu yang dimiliki oleh manusia⁷⁴. Pengertian dari Abdurahman al Nahlawi dan Mubarak tersebut dapat disatukan bahwa fitrah yang berupa potensi yang dimiliki manusia harus dipelihara dari sesuatu yang dapat merusak fitrah tersebut. *Kedua*, yakni menumbuhkan yang berarti menumbuhkan seluruh potensi manusia.

⁷² Ismail, Nurul Huda dan Abdul Kholiq (editor), 2001, Paradigma Pendidikan Islam, Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang

⁷³ Mahfud, Choirul. 2008. *Pendidikan Multikultura*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

⁷⁴ Mubarak, 2003, *Sunnatullah dalam jiwa manusia*, Bandung: Mizan

Nashori menyebutkan bahwa potensi selain berarti juga konsep fitrah yang berarti juga potensi-potensi dan sifat-sifat asal manusia yang berkaitan dengan masalah spiritual yaitu dalam hubungannya dengan keyakinan-keyakinan terhadap Tuhan. Disamping itu lanjut Nashori berpendapat ada potensi lain yang dimiliki manusia yaitu potensi berfikir (kognitif), emosi (afektif), fisik, dan sosial).⁷⁵ Quraish Shihab menyebutkan potensi-potensi manusia juga berkaitan dengan kecenderungan hati kepada lawan jenis, anak-anak, harta, binatang ternak, sawah dan lading dan seterusnya, sebagaimana disebut Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 14, yang artinya “telah dihiaskan kepada manusia kecenderungan hati kepada perempuan (dan laki-laki) anak laki-laki (dan perempuan) serta harta yang banyak berupa emas, perak, kuda peliharaan, binatang ternak sawah dan lading”.

Ketiga, Mengarahkan segala potensi yang dimiliki manusia. Mubarak menyebutkan pengarahan potensi menuntut lingkungan yang kondusif dan ideal. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan sosial (termasuk sekolah)⁷⁶. Keempat, bertahap dalam prosesnya. Nashori menyebutkan ada tingkatan perkembangan manusia mulai dari kehidupan pra lahir, fase bayi, fase kanak-kanak, fase tamyiz, fase amrad, fase taklif, fase futuh dan kehidupan pasca kematian. Pendidikan formal dimulai dan bisa menerima ilmu pengetahuan adalah pada fase tamyiz sekitar umur 7 – 10 tahun⁷⁷.

Istilah kedua adalah *at ta'lim*. Istilah ini secara etimologis berasal dari kata kerja 'allama yang berarti mengajar seperti yang diterangkan Allah dalam surat al Baqarah ayat 151. Dalam hadist nabi Nabi kata *at ta'lim* lebih sering digunakan daripada kata *at tarbiyah* dan *at ta'dib* dan kata *ta'lim* lebih

⁷⁵ Nashori, F., 2003, Potensi-potensi Manusia, Pustaka Pelajar

⁷⁶ Mubarak, A. 2003, Sunnatullah dalam Jiwa Manusia, Jakarta IIIT Indonesia, hal 45

⁷⁷ *Ibid*

universal daripada kata *at tarbiyah* dan *at tadib*. Rasyid Ridha (dalam Ismail dkk, 2001)⁷⁸ menyebutkan *at ta'lim* sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Abdul Fata Jalal menyebutkan *at ta'lim* tidak hanya pengetahuan lahiriyah tapi juga mencakup pengetahuan teoritis, mengulang secara lisan, beserta pengetahuan yang menyangkut ketrampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan dan pedoman untuk berperilaku. Ditambahkan oleh Rahman berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 31-32 menyebutkan bahwa kata *ta'lim* dari term 'allamalebih pada aspek pemberian informasi, karena pengetahuan yang dimiliki itu semata-mata karena akibat dari pemberitahuan. Oleh karena kata *ta'lim* menempatkan peserta didik sebagai obyek yang pasif. Al Tabatabai menjelaskan bahwa pendidikan dalam arti *at ta'lim* menunjukkan proses pemberian informasi kepada obyek didik yang menandakan obyek sebagai makhluk berakal. Istilah kedua adalah *at ta'dib*. *At ta'dib* berasal dari kata *adab* yang bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan, pengajaran atau mendidik. Selanjutnya jika dilihat dari bentuk dasarnya *at ta'dib* berasal dari kata *aduba ya'dubu* yang berarti melatih diri untuk berbuat baik dan santun, *adaba ya'dibu* yang bermakna mengadakan pesta atau perjamuan yang berarti berbuat baik dan berlaku santun. Dan yang ketiga adalah *addaba* bentuk kata kerja *ta'dib* mengandung pengertian mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplin dan memberi tindakan⁷⁹. Dari ketiga kata tersebut dapat diartikan bahwa *at ta'dib* lebih mengarah pada perbaikan tingkah laku. Dalam Al Qur'an kata *at ta'dib* tidak disebutkan. Hal ini mungkin bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam lafal *at ta'dib* sudah termasuk dalam lafal *tarbiyah* dan *ta'lim*.

⁷⁸Ismail, Nurul Huda dan Abdul Kholiq (editor), 2011, Paradigma Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang

⁷⁹ *ibid*

Membandingkan dan menghubungkan pengertian dari tiga kata yaitu *at tarbiyah*, *at ta'lim* dan *at tadib* menurut hemat penulis pendidikan dalam Islam harus mencakup tiga hal yaitu *at tarbiyah*, *at ta'lim* dan *at ta'dib*. Kata *tarbiyah* menyangkut pendidikan aspek kognitif, afektif, konatif dalam bentuk berbakti dan kepedulian. Sedangkan kata *at ta'lim* lebih kepada etika religious. Etika religious maksudnya adalah ilmu bersumber dari Allah, maka manusia sebagai penerima ilmu harus tunduk pada pemberi ilmu yaitu Allah SWT. Supaya ilmu yang diberikan dan didapatkan tersebut tidak bertentangan dengan tatanan moral kemanusiaan, maka diperlukan pendidikan dalam pengertian *at ta'idib*. *At ta'lim* harus dihiasi dengan akhlak yaitu terma dari *at ta'dib*.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha maksimal untuk menentukan kepribadian anak didik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam al-Qur`an dan Sunnah. Usaha tersebut senantiasa harus dilakukan melalui bimbingan, asuhan dan didikan, dan sekaligus pengembangan potensi manusia untuk meningkatkan kualitas intelektual dan moral yang berpedoman pada syariat Islam.

b. Pengertian Pendidikan Secara Umum

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya, yakni, pandangan hidup, sikap

hidup dan keterampilan hidup⁸⁰. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Kegiatan di sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara ketat dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan di luar sekolah, meski memiliki rencana dan program yang jelas tetapi pelaksanaannya relatif longgar dengan berbagai pedoman yang relatif fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Pelaksanaan pendidikan dalam keluarga dilaksanakan secara informal tanpa tujuan yang dirumuskan secara baku dan tertulis. Dengan mendasarkan pada konsep pendidikan tersebut di atas, maka sesungguhnya pendidikan merupakan pembudayaan atau "*enculturation*", suatu proses untuk mentasbihkan seseorang mampu hidup dalam suatu budaya tertentu.

Sejalan dengan pendapat Maulana pendidikan dapat dihuraikan menerusi dua sudut pandangan. Sudut pandangan yang pertama adalah berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat memandang pendidikan sebagai suatu proses pewarisan atau penyaluran kebudayaan yang mengandung nilai-nilai budaya oleh generasi tua kepada generasi muda secara berterusan supaya kelangsungan hidup sebuah masyarakat dapat berlaku⁸¹. Sudut pandangan yang kedua pula adalah menjurus kepada individu. Dari sudut individu, pendidikan merupakan proses membangunkan dan menggilap potensi-potensi yang sememangnya ada dalam diri manusia sehingga potensi-potensi tersebut dapat mewujudkan kemampuan tertentu bagi menjamin kehidupan manusia yang seimbang dan normal.

Dalam Islam, pendidikan tidak hanya berorientasi keduniaan tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Anis berpendapat bahwa tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah SWT (QS az Zariyat ayat 5 dan QS al Bayyinah ayat 5). Karena tujuan pendidikan identik dengan tujuan hidup

⁸⁰ Fattah, Nanang, 2008, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal 66

⁸¹ Hasmori, A.A. dkk 2011, *Journal of Edupres*, Volume 1 September, 2011

manusia, maka tujuan pendidikan adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi hamba yang mukhlis⁸². Pendapat Anis ini mengisyaratkan bahwa pendidikan adalah mempelajari alam semesta beserta isinya yang diciptakan Allah dengan tetap berlandaskan pada ajaran Islam (tauhid). Kalau pendidikan lepas dari ajaran Islam maka pendidikan tersebut menjadi tidak memiliki tujuan yang luhur dan suci.

c. Jenis dan Bentuk Pendidikan di Indonesia

Berbagai jenis konfigurasi pendidikan sesuai dengan konsep yang diutarakan oleh Randall Collins⁸³, ada tiga tipe dasar pendidikan yang hadir di seluruh dunia, yakni: *Pertama*, jenis pendidikan keterampilan dan praktis, yakni pendidikan yang dilaksanakan untuk memberikan bekal keterampilan maupun kemampuan teknis tertentu agar dapat diaplikasikan kepada bentuk mata pencaharian masyarakat. Jenis pendidikan ini dominan di dalam masyarakat yang masih sederhana baik itu berburu dan meramu, nelayan atau juga masyarakat agraris awal. *Kedua*, Pendidikan kelompok status, yaitu pengajaran yang diupayakan untuk mempertahankan prestise, simbol serta hak-hak istimewa (*privilage*) kelompok elit dalam masyarakat yang memiliki pelapisan sosial. Pada umumnya pendidikan ini dirancang bukan untuk digunakan dalam pengertian teknis dan sering diserahkan kepada pengetahuan dan diskusi badan-badan pengetahuan esoterik. Pendidikan ini secara luas telah dijumpai dalam masyarakat-masyarakat agraris dan industri. *Ketiga*, tipe pendidikan birokratis yang diciptakan oleh pemerintahan untuk melayani kepentingan kualifikasi pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintahan serta berguna pula sebagai sarana sosiolisasi politik dari model pemerintahan kepada masyarakat

⁸² Anis, M. Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, 2012, Yogyakarta : Mentari Pustaka

⁸³ Collins, R. (2004). Interaction ritual chains. Princeton: Princeton University Press. Hal 7

awam. Tipe pendidikan ini pada umumnya member penekanan pada ujian, syarat kehadiran, peringkat dan derajat.

Jalur pendidikan nasional di Indonesia ada tiga yaitu: jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya yang diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh (pasal 13). Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (pasal 14). Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus (pasal 15). Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (pasal 16)⁸⁴.

Secara khusus pada sebuah lembaga organisasi pendidikan bersifat kompleks, karena didalamnya terdapat beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit dan saling berkaitan. Di dalamnya juga bergabung berbagai macam manusia yang mempunyai latar belakang berbeda-beda, terjadi interaksi antar manusia secara perseorangan maupun kelompok yang complicated. Oleh karena itu perlu adanya aturan baku seperti. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, PP. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Menengah, Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 0293/E/1993 tentang BP3, Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 085/K/1994 tentang Pengangkatan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan, Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, PP. RI. Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Permendiknas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk digunakan dalam Proses Pembelajaran, dan berbagai ketentuan lainnya

⁸⁴ UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

untuk dapat memperlancar proses pendidikan (dalam Jabar A., tt)⁸⁵.

Kelembagaan jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, vokasi, keagamaan, dan khusus". Pengertian dari pasal 15 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendidikan Umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Pendidikan Kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
3. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program pasca sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
4. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
5. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
6. Pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
7. Pendidikan Khusus merupakan penyelenggara pendidikan untuk peserta didik yang berlainan atau peserta didik yang

⁸⁵ Jabar A. tt Peranan Kepemimpinan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Lembaga Pendidikan Makalah, Seminar Nasional Ikatan Psikologi Pendidikan Indonesia, 2010

memiliki kecerdasan yang luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah⁸⁶.

Dengan perkembangan peradaban, teknologi dan informasi, jenis dan bentuk sekolah di Indonesia juga mengalami perubahan dan perkembangan. Pendidikan yang diatur dalam UU yang dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Untuk kota Pekanbaru jenis dan bentuk pendidikan tidak berbeda jauh dengan yang berada di kota lain di Indonesia. Di kota Pekanbaru ada 4 jenis dan bentuk lembaga pendidikan baik untuk tingkat dasar dan menengah. Keempat bentuk tersebut adalah :

1. Pendidikan umum. Bentuk dan jenis ini banyak dimiliki oleh lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Jam belajar yang digunakan adalah 6 – 7 dalam sehari, tidak memakai pemonudukan atau asrama. Biaya untuk jenis pendidikan lebih murah karena siswa tidak dipungut biaya pendidikan.
2. Pendidikan umum dan agama. Jenis dan bentuk pendidikan ini dikelola oleh swasta. Jenis pendidikan ada yang berbentuk kejuruan dan vokasi. Waktu belajar 8-9 jam dalam sehari. Ada penambahan pada materi pelajaran yang berhubungan dengan agama dan ketrampilan (ekstra kurikuler), tidak ada pemonudukan untuk peserta didik. Biaya untuk jenis pendidikan lebih mahal.
3. Pendidikan umum dan agama. Jenis pendidikan ini semi pesantrean yang dikelola oleh pihak swasta. Jenis pendidikan ada yang berbentuk kejuruan dan vokasi. Peserta didik ada yang diasramakan ada yang tidak, tergantung kemauan orang tua. Waktu belajar dan biaya pendidikan berbeda antara yang ada di asrama dengan yang tidak di asrama. Biaya pendidikan yang asrama lebih mahal dan waktu belajar formal lebih lama dibanding dengan yang tidak di asramakan.

⁸⁶ UU. Nomor 20 Tahun 2003 Bab IV, pasal 15

4. Pendidikan pesantren. Lembaga pendidikan ini dikelola oleh swasta (yayasan keagamaan) yang bersifat umum (bukan kejuruan atau vokasi). Jam belajar formal bisa lebih panjang sekitar 10-12 jam dalam sehari. Waktu jam belajar tersebut banyak digunakan untuk penguatan penguasaan ilmu-ilmu keagamaan dan peserta didiknya diwajibkan tinggal di asrama. Biaya untuk jenis pendidikan ini sedang sampai mahal.

d. Pendidikan dan Masyarakat

Dalam UU No. 20 tahun 2003. bab III pasal 4 tentang pendidikan nasional disebutkan bahwa:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan⁸⁷.

Dalam pasal tersebut, pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu dari guru ke siswa tapi lebih dalam dari hal itu

⁸⁷ UU. Nomor 20 Tahun 2003 bab III pasal 4

yaitu membentuk dan mengembangkan siswa menjadi manusia yang dapat mengaktualisasikan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki serta penanaman nilai moral dan etika kepada peserta didik. Untuk mencapai hal tersebut komponen masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek pendidikan turut serta dalam proses pencapaian maksud dan tujuan pendidikan nasional. Bahkan dalam pasal berikutnya lebih tegas disebutkan bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan baik yang sehat secara fisik dan psikologis maupun yang tidak.

Selain itu hubungan antara masyarakat dan pendidikan adalah bahwa pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda secara keseluruhan dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Di sisi lain pendidikan memiliki fungsi, peran dan kiprah yang berkorelasi dengan kekuatan-kekuatan masyarakat. Pendidikan juga memberikan andil menerjemahkan nilai-nilai baru yang tumbuh akibat proses pergulatan sejarah dalam wujud emansipasi integrasi dengan sistem dan struktur sosial masyarakat, sehingga dengan demikian masyarakat tidak pernah kering dari dinamika perubahan dan evolusi sosialnya..

Banyak keluhan yang dilontarkan masyarakat sebagai pemakai jasa pendidikan terhadap mutu pelayanan pendidikan dewasa ini perlu ditanggapi. Keluhan masyarakat ini membuktikan bahwa pendidikan dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yang tak dapat dipisahkan. Masyarakat perlu pendidikan dan pendidikan diperlukan untuk mencerdaskan dan menumbuhkembangkan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan bukti empiris tentang kebenaran dari suatu situasi yang dialamatkan pada pendidikan. Untuk menggali bagaimana pandangan masyarakat terhadap mutu pelayanan pendidikan perlu dicari cara yang memungkinkan untuk dilakukan baik secara pribadi maupun kelompok.

Dari data yang ada, selama tiga dasawarsa terakhir, dunia pendidikan Indonesia secara kuantitatif telah berkembang sangat cepat. Pada tahun 1965 jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak 53.233 dengan jumlah murid dan guru sebesar 11.577.943 dan 274.545 telah meningkat pesat menjadi 150.921 SD dan 25.667.578 murid serta 1.158.004 guru (Pusat Informatika, Balitbang Depdikbud, 1999). Jadi dalam waktu sekitar 30 tahun jumlah SD naik sekitar 300%. Sudah barang tentu perkembangan pendidikan tersebut patut disyukuri. Namun sayangnya, perkembangan pendidikan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan yang sepadan⁸⁸. Akibatnya, muncul berbagai ketimpangan pendidikan di tengah-tengah masyarakat, termasuk yang sangat menonjol adalah: a) ketimpangan antara kualitas *output* pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, b) ketimpangan kualitas pendidikan antar desa dan kota, antar jawa dan luar jawa, antar penduduk kaya dan penduduk miskin. Di samping itu, di dunia pendidikan juga muncul dua problem yang lain yang tidak dapat dipisah dari problem pendidikan yang telah disebutkan di atas.

Hubungan antara pendidikan dan masyarakat dapat dihubungkan dengan pendekatan sosial dan budaya. Woolfolk, berpendapat pendidikan merupakan proses yang berlangsung dalam suatu budaya tertentu. Banyak nilai-nilai budaya dan orientasinya yang bisa menghambat dan bisa mendorong pendidikan. Bahkan banyak pula nilai-nilai budaya yang dapat dimanfaatkan secara sadar dalam proses pendidikan⁸⁹.

Sebagai contoh di Jepang "*moral Ninomiya Kinjiro*" merupakan nilai budaya yang dimanfaatkan praktek pendidikan untuk mengembangkan etos kerja. Kinjiro adalah anak desa yang miskin yang belajar dan bekerja keras sehingga bisa

⁸⁸ Edris Zamroni dan Susilo Rahardjo Manajemen Bimbingan Dan Konseling Berbasis Permendikbud *Jurnal Konseling GUSJIGANG* Nomor 111 Tahun 2014, Vol. 1 No. 1 hal 17 - 32

⁸⁹ Woolfolk, A, 2009 *Educational Psychology*, Allyn and Bacon, 75 Arlington Boston. Hal 102

menjadi samurai, suatu jabatan yang sangat terhormat pada orang miskin, orang tuanya tidak mampu membeli alat penerangan. Oleh karena itu dalam belajar ia menggunakan penerangan dari kunang-kunang yang dimasukkan dalam botol. Kerja keras diterima bukan sebagai beban, melainkan dinikmati sebagai pengabdian. Selain semangat kerja keras, budaya Jepang juga menekankan rasa keindahan yang tercerminkan pada ketekunan, hemat, jujur dan bersih sebagaimana semangat Kinjiro diwujudkan dalam patung anak yang sedang asyik membaca sambil berjalan dengan menggendong kayu bakar di bahunya. Patung tersebut didirikan di setiap sekolah di Jepang.

Dalam upaya untuk mewujudkan satu perubahan penting bagi lembaga pendidikan tentu sangat diperlukan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dimana lembaga pendidikan itu berada. Dukungan yang diperlukan meliputi antara lain: (1). Personil, seperti: tenaga ahli, konsultan, staf pengajar, orang tua, pengawas dan sebagainya, (2). Sumber dana yang diperlukan untuk mendukung tersedianya fasilitas seperti gedung, perlengkapan kantor, kepustakaan, dan perlengkapan bahan-bahan pengajaran lainnya, (3). Dukungan berupa informasi dari berbagai media, lembaga instansi terkait, dan berbagai sumber lainnya guna mendukung kelancaran proses pendidikan, (4). Perlu adanya dukungan dari Dewan Pendidikan (Majelis Pendidikan) sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis (Jabar, A. tt)⁹⁰

Untuk Indonesia, tentunya perlu dicarikan model pendidikan yang tepat untuk kalangan masyarakat miskin dan budaya Indonesia. Ketepatan dalam mencarikan model pendidikan ini diharapkan merubah konstruksi realitas sosial

⁹⁰ *Ibid*

masyarakat miskin kearah yang lebih terarah dan baik yaitu tentang pendidikan dan perubahan tersebut akan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Untuk sampai pada tahap tersebut tentu perlu dilakukan penelitian tentang keadaan konstruksi realitas sosial masyarakat miskin.

Oleh sebab itu, menurut Danglova, upaya pengukuran kemiskinan akan mendekati sempurna manakala digunakan beberapa tolak ukur secara bersama-sama untuk dapat digunakan sebagai perbandingan. Namun karena kemiskinan merupakan realitas sosial, maka pendekatan yang menggunakan kaidah ilmu-ilmu sosial hendaknya diutamakan Danglova.⁹¹

G. Konstruksi Realitas Sosial Masyarakat Miskin Tentang Pendidikan

Pendidikan dapat bersifat formal, non formal dan informal (formal dan tidak formal). Bersifat formal apabila peningkatan kecakapan itu dilakukan dalam lingkungan khusus (misalnya sekolah) dan tidak formal apabila kecakapan itu diperoleh lewat pengalaman kehidupan atau belajar sendiri dari lingkungan. Namun apabila dihubungkan dengan fenomena lain (misalnya pendapatan) maka yang digunakan adalah tingkat pendidikan formal sebab yang diperoleh lewat pengalaman kehidupan atau lingkungan susah ditentukan besarnya, kecuali dijadikan variabel tersendiri berupa pengalaman.

Kegiatan mengenai penanganan masalah kemiskinan telah banyak dilakukan di Indonesia. Demikian juga kegiatan mengenai pola mengatasi kemiskinan yang dilaksanakan oleh masyarakat miskin telah beberapa kali dilakukan. Namun, kegiatan di Indonesia yang mengkaji secara psikologis tentang konstruksi realitas sosial masyarakat miskin tentang pendidikan sebagai masalah yang harus diatasi belum pernah ditemui, terlebih kajian yang mengaitkannya dengan program pembangunan manusia khususnya bagaimana sebenarnya konstruksi realitas sosial

⁹¹ Danglova, O. 1998. The Phenomenon on Poverty in The Slovak Countryside. *Jurnal Human Affairs*, 8(2), 193-200

masyarakat miskin tentang pendidikan yang sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Meski demikian beberapa kegiatan baik berupa workshop, pelatihan, maupun penelitian yang mengkaji secara khusus terhadap masing-masing variabel secara pisah telah beberapa kali dilakukan.

Hal yang perlu dipahami adalah pengukuran kemiskinan akan mendekati kebenaran jika dikaji dari kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat miskin. Kebiasaan hidup yang didefinisikan sebagian ahli sebagai budaya kemiskinan antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan termasuk didalamnya jumlah anak putus sekolah, rendahnya tingkat partisipasi (*apatis*) dalam penataan wilayah dan aktivitas sosial kemasyarakatan, rendahnya kemampuan dan kehendak menabung serta berinvestasi, malas, gemar mengkonsumsi minuman beralkohol, orientasi/kepuasan sesaat, tinggal di rumah kumuh, bekerja disektor informal dan memiliki penghasilan di bawah upah minimum wilayah tersebut, fatalistik atau percaya bahwa kemiskinan adalah sebuah kodrat, *deprivasi* sosial yang diterima, kualitas pangan, cenderung menyalahkan situasi (*low self awarreness*) dan perilaku-perilaku menyimpang termasuk gangguan mental dan perilaku pada anak-anak⁹². Realitas ini menjadikan masyarakat miskin tetap berada dalam kategorinya sebagai masyarakat miskin.

Seluruh lapisan masyarakat memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap keberhasilan dan kemajuan dalam bidang pendidikan. Ekspektasi yang dilakukan masyarakat, khususnya masyarakat miskin belum dapat terealisasi secara maksimal hingga sekarang. Pendidikan masyarakat miskin masih tertinggal dibanding masyarakat yang tidak miskin. Kalaupun ada peningkatan pendidikan pada masyarakat miskin baru bersifat kasuistik dan parsial, artinya belum ada peningkatan pada

⁹² Prihadiyanto D.A.S ., 2005, *Pemikiran-Pemikiran Masyarakat Miskin Tentang Kemiskinan Dan Program Pembangunan Kawasan Berbasis Kerakyatan (Community Based Development)* Di Kota Semarang, *Tesis*, Porgam Pasca Sarjana Psikologi UGM Yogyakarta. Tidak Diterbitkan

pemikiran dan aktualisasi berpartisipasi secara penuh dan konsisten pada seluruh kalangan masyarakat miskin.

Kecenderungan yang banyak terjadi dalam hal mencari lembaga pendidikan bagi masyarakat miskin adalah pendidikan yang biayanya murah dan kalau bisa gratis. Hal ini dilakukan karena masyarakat lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan. Akibatnya kebutuhan terhadap pendidikan tidak menjadi prioritas utama. Yang terjadi adalah masyarakat miskin akan memilih lembaga pendidikan yang biayanya murah tanpa memikirkan apakah lembaga pendidikan tersebut berkualitas atau tidak. Pemilihan sekolah murah dan asal pilih sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah pemenuhan kebutuhan pendidikan menjadi yang utama atau tidak? Apakah konstruk masyarakat miskin tentang pendidikan dipahami oleh unsur-unsur dalam lembaga pendidikan tersebut?. Kedua pertanyaan tersebut akan terjawab, kalau masyarakat miskin dan unsur-unsur dalam lembaga pendidikan ada kesepahaman tentang makna pendidikan yang sebenar-benarnya.

Dalam realitas yang tidak dipungkiri bahwa ada konstruksi pada masyarakat, bahwa ada hubungan antara biaya pendidikan yang mahal dengan tingkat kualitas pendidikannya. Semakin mahal biaya pendidikan semakin berkualitas sekolah tersebut. Hal ini tidak seluruhnya benar, karena mahalnya sekolah tersebut dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang lebih lengkap. Fasilitas ini berguna sebagai sarana untuk menumbuhkan kemampuan siswa. Sekolah yang tidak atau kurang memiliki fasilitas lengkap tentu dalam proses belajar mengajar hanya mengandalkan pertemuan dalam kelas dan kurang dibantu oleh alat-alat atau fasilitas lain yang dapat mengasah dan menunbuhkembangkan kemampuan bakat dan minat peserta didik. Perbedaan keadaan sekolah ini akan nampak dimulai penerimaan murid, proses dan output. Hal lain adalah nilai rata-rata peserta didik yang berada di sekolah yang tidak mahal berada pada level rata-rata bawah. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal ini. Salah satu

diantaranya adalah sekolah tidak atau kurang mampu menyediakan fasilitas penunjang proses belajar mengajar anak. Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah seperti peralatan praktek, laboratorium, perpustakaan yang lengkap baik buku dan ruangan, ruangan belajar yang nyaman dan aman, ruangan bermain, lingkungan sekolah yang sehat dan tertata rapi dan hal lain yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan peserta didik.

Qomar berpendapat bahwa kalau keadaannya dibalik, anak yang tingkat kemampuannya di bawah rata-rata berada di sekolah mahal dan anak dengan tingkat kemampuan di atas rata-rata ditempatkan di sekolah yang murah, apakah hasilnya sama dengan realitas yang terjadi, yaitu apakah sekolah-sekolah yang mahal tersebut masih berkualirtas? Dan sekolah-sekolah yang murah tidak berkualitas?. Apakah yang dikenal maju dan mahal itu peserta didiknya menjadi pandai dan apakah sekolah yang murah peserta didiknya menjadi bodoh?⁹³.

Pokok permasalahan tentang bagaimana menjadikan pendidikan yang terjangkau oleh seluruh masyarakat dengan kualitas yang tinggi dan yang sesuai dengan karateristik masyarakat dan kebutuhan. Oleh karena itu unsur-unsur (pemerintah, guru dan pemerhati pendidikan) dalam hal pendiidikan harus memahami bagaimana konstruk realitas masyarakat miskin tentang pendidikan yang sesuai dengan karakterstiknya. Dengan memahami ini maka para pengambil kebijakan akan dapat mengambil suatu keputusan yang arif dan bijaksana tentang lembaga pendidikan yang berkualitas yang dapat dinikmati oleh siapapun khususnya masyarakat miskin.

Hubungan antara kemiskinan dan pendidikan adalah penting, karena pendidikan memegang proses utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Salah satu manfaat yang tidak dapat diabaikan adalah adanya harapan bahwa peningkatan pendidikan akan menghasilkan peningkatan pendapatan di kemudian hari. Sagir, melihat adanya hubungan

⁹³ Qomar,M., 2013, Strategi Pendidikan Islam, , Jakarta : Erlangga

antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan. Beliau mengatakan: Sumber daya manusia mampu meningkatkan kualitas hidupnya melalui suatu proses pendidikan, latihan, dan pengembangan yang akan menjamin produktivitas kerja yang semakin meningkat. Sehingga akhirnya menjamin pula pendapatan yang cukup dan kesejahteraan hidupnya yang semakin meningkat⁹⁴. Dengan demikian maka adalah menarik untuk dikaji apakah pendidikan benar-benar meningkatkan tingkat pendapatan ekonomi di kemudian hari. Vanmler, H menyatakan bahwa jika seseorang yang lebih baik dalam hal pendidikan memiliki penghasilan yang lebih tinggi dan dengan demikian sedikit dari masyarakat yang miskin yang mampu untuk sekolah⁹⁵. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan partisipasi pendidikan yang lebih baik akan memungkinkan untuk tidak terjebak dalam kemiskinan.

Kuo juga berpendapat bahwa atensi masyarakat sekitar berupa kepedulian untuk saling menyapa, tersenyum ketika berpapasan dan kesediaan tolong menolong dapat memberikan suasana menggembirakan. Suasana akrab dan menggembirakan tersebut dapat meningkatkan gairah bekerja dan diasumsikan sebagai salah satu bentuk coping terhadap kemiskinan⁹⁶.

Asumsi mengenai pola rasionalitas penduduk miskin terhadap kemiskinan yang menyatakan bahwa kelompok miskin di Peru mampu mengkonsolidasikan seluruh sumber daya yang mereka miliki guna memberikan reaksi secara rasional terhadap kemiskinan yang mereka alami⁹⁷. Kelompok miskin memiliki waktu kerja yang jumlahnya jauh lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka juga sangat *inovatif*, bahkan dalam

⁹⁴ Sagir, 2009, Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, Hasil Penelitian. Laporan Penelitian.

⁹⁵ Vanmler, H. (2006). Developmental differences in drawing performance of the dominant and nondominant hand in right-handed boys and girls. *Human Movement Science*, 25, 657–677.

⁹⁶ Kuo (2001), *Psychology: Exploration in behavior and experience*. New Jersey: John Wiley and Sons. Social Psychology. Upper Saddle River New Jersey: Prentice Hall, *Journal Applied Social Psychology*, 31, 231- 241

⁹⁷ Ramon, J, 2010, *Measuring Poverty*, Makalah pada seminar Pengenalan Analisis dan Pengukuran Kemiskinan di Pemerintah Provinsi Riau

lingkungan yang mendukung, kelompok miskin ini dapat berkembang dan memperoleh kesempatan perbaikan kondisi ekonomi.

Kemiskinan berakibat pada partisipasi dan kualitas orang miskin. Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan yang bermutu sangat terbatas. Farley dalam hasil penelitiannya di Amerika Serikat prestasi anak-anak miskin umumnya lebih rendah dibanding anak-anak yang tergolong beruntung⁹⁸. Keadaan di Amerika tentunya juga terjadi di seluruh negara, dimana prestasi yang tinggi didapatkan dari lembaga pendidikan yang baik. Lembaga pendidikan yang baik tersebut tidaklah dapat dimasuki oleh masyarakat miskin, dan pada akhirnya prestasi anak-anak miskin selalu rendah. Kondisi ini akan berdampak dikemudian hari, dimana anak-anak miskin ini memasuki usia kerja. Maka yang terjadi adalah anak-anak miskin akan digolongkan sebagai pekerja tidak terampil bahkan bisa menjadi penganggur. Apabila berkeluarga, maka pendidikan anak-anaknya juga tidak akan jauh berbeda dengan orang tuanya yaitu mendapatkan kualitas pendidikan yang relatif sama. Ini menjadi sebuah siklus pendidikan yang berlangsung dari generasi ke generasi.

Konstruksi realitas sosial pada masyarakat miskin akan mengarahkan dan mencirikan suatu bentuk perilaku tertentu tentang sesuatu, dalam hal ini adalah pendidikan. Apabila masyarakat mengkonstruksikan pendidikan sesuatu yang tidak begitu penting dan tidak begitu perlu maka akan menempatkan pendidikan di urutan yang tidak menjadi prioritas. Ini menunjukkan bahwa hubungan masyarakat dengan pendidikan berjalan sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki dan keadaan ini tidak akan berubah pada anak jika pendidikan yang dimiliki orang tua diaplikasikan dalam kehidupan keluarga tersebut. Jika pendidikan dianggap penting maka akan menjadi prioritas, namun untuk mencapai prioritas tersebut bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat miskin, tapi karena akses dan

⁹⁸ Markum, E., 2009, Pendekatan kemiskinan dan Pendekatan Psikologi Sosial, *Jurnal*, Psikobuana, Vol 1, No. 1, 1-12

kemampuan yang rendah maka masyarakat miskin selalu menjadi kelompok pekerja tidak terampil dan akan mendapatkan pekerjaan dan berusaha dibidang yang tidak banyak membantu meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan angka melek huruf. Angka Partisipasi Sekolah Angka partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 tahun yang masih terlibat dalam sistem persekolahan. Adakalanya penduduk usia 7-12 tahun belum sama sekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat sekolah dasar. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri yakni merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Terakhir adalah angka melek huruf. Salah satu variabel yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Adapun kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan⁹⁹.

Maka dalam penelitian ini indikator pendidikan yang digunakan sebagai variabelnya adalah pendidikan formal dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Variabel ini dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Sedangkan masyarakat

⁹⁹ Hendra, R, 2010, Determinan kemiskinan..., Roy Hendra, FE UI

miskin yang dimaksud adalah masyarakat marginal yang mencari kehidupan di jalanan di sekitar jalan di Kota Pekanbaru.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruk realitas sosial masyarakat miskin tentang pendidikan. sehingga penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan melihat secara dekat interpretasi individual tentang pengalaman-pengalamannya dari sisi fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi berusaha memahami makna dari sebuah pengalaman dari perspektif partisipan dalam penelusuran konstruk realitas sosial masyarakat miskin tentang pendidikan. Fenomenologi sebagai metoda mempunyai empat karakteristik, yaitu deskriptif, reduksi, esensi dan intensionalitas¹⁰⁰.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang tinggal di kelurahan Tuah Karya kecamatan Tampan kota Pekanbaru yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin menurut data BPS yang ditandai dengan aktivitas sebagai pekerja sektor informal, pendapatan dan jenis tempat tinggal yaitu belum memiliki rumah sendiri (masih mengontrak). Data subyek penelitian adalah, tukang serbanyak 2 orang, pemulung sebanyak 2 orang, pedagang sayur sebanyak 3 orang, tukang parkir sebanyak 3 orang, pedagang buah sebanyak 2, pedagang sate keliling sebanyak 1, serabutan sebanyak 1 orang dan buruh took bangunan 1 orang. Seluruh subyek sudah berkeluarga dan memiliki anak usia sekolah. Adapun jumlah

¹⁰⁰ Tom O'D. and Keith P. Ed. (2003) *Qualitative Educational Research In Action: Doing and reflectin g* London: RoutledgeFalmer Pub

subyek pada penelitian ini berjumlah 15 orang. Penentuan subyek penelitian berdasarkan informasi dari kepala kelurahan Tuah Karya yang berjumlah 3 (tiga) orang. Kemudian dari tiga orang tersebut diminta informasi yang berkenaan dengan seseorang yang dikategorikan miskin dengan menjelaskan kriteria kemiskinan. Berdasarkan informasi dari subyek terdahulu maka didapatkan jumlah subyek sebanyak 15 (lima belas) orang subyek penelitian.

3. Teknik Pengambilan Subyek

Teknik pengambilan subyek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik purposif sampling yaitu sampel tidak diambil secara acak tetapi justru dipilih mengikuti kriteria tertentu. Teknik ini peneliti pilih karena memberikan pilihan-pilihan untuk mengambil prosedur yang dianggap sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Adapun karakteristik dalam pengambilan subyek akan disesuaikan dengan kriteria atau karakteristik daerah kota Pekanbaru yang dikeluarkan ketentuannya oleh BPS Provinsi Riau yaitu ada 8 (delapan) dari empat belas kriteria masyarakat dikategorikan miskin, yaitu:

1. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
2. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
3. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
4. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
5. Hanya sanggup akan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
6. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
7. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 M², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan

8. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Alasan peneliti hanya menggunakan 8 (delapan) kriteria, disebabkan di daerah subyek penelitian, tidak terdapat point 1 – 6. Hal ini sesuai dengan keterangan yang ditulis oleh BPS dan dari kantor kelurahan Tuah Karya bahwa untuk mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama. Dalam hal ini BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi keebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi masyarakat miskin adalah yang memiliki rata-rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garisn kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Alasan peneliti menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk validasi temuan. Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menggunakan wawancara dengan menggunakan pedoman

wawancara. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan, yaitu:

a. Metode wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian ini dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka langsung antara peneliti dengan subyek penelitian (informan) atau orang yang diwawancarai. Pelaksanaan ini bertujuan untuk memperoleh data penelitian serta pengetahuan tentang konstruk realitas sosial masyarakat miskin tentang pendidikan yang dipahami individu berkenaan dengan topik penelitian.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan untuk digunakan karena peneliti mengambil data dari BPS, data dari kecamatan Tampan dan data dari kelurahan Tuah Karya. Data tersebut bermanfaat untuk menentukan gambaran masyarakat tempat penelitian berupa data demografi dan untuk menentukan kriteria kemiskinan.

5. Alat Bantu Pengumpulan Data

Untuk meningkatkan validitas hasil pengamatan dalam penelitian ini ada beberapa alat bantu yang digunakan, yaitu:

a. Pedoman wawancara

Digunakan untuk memfokuskan dan mengarahkan jalannya wawancara, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman wawancara juga sebagai alat bantu untuk mengkategorisasikan jawaban. Pedoman wawancara berisikan poin-poin penting mengenai hal-hal yang ditanyakan. Adapun pedoman tersebut adalah yang berhubungan dengan teori konstruk realitas dari Berger dan Luckmann yaitu: eksternalisasi yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia kedalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Obyektivitas adalah hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut dan internalisasi yaitu lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran

sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Teori konstruk realitas akan dihubungkan dengan kemiskinan yang dihadapi subyek penelitian. Jumlah *guide* pertanyaan yang peneliti ajukan sebanyak 7 (tujuh) pertanyaan, namun dalam pelaksanaannya berkembang menjadi 16 (enam belas) pertanyaan. Adapun *guide* pertanyaan yang berdasarkan teori konstruk realitas sosial tersebut adalah:

1. Eksternalisasi

- Apa saja yang telah bapak/ibu lakukan selama ini untuk kehidupan keluarga?
- Menurut Bapak/Ibu apakah pendidikan itu perlu atau penting, jelaskan?
- Apa keinginan bapak/Ibu terhadap anak?
- Apa saja usaha yang Bapak/Ibu lakukan untuk memenuhi keinginan anak?
- Bagaimana Bapak/Ibu mempersiapkan pendidikan yang lebih baik untuk anak (seperti apa) (eksternalisasi)?

2. Objektivitas hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut

- Bagaimana Bapak menilai keadaan bapak sekarang?
- Apakah pendidikan itu dapat menjadikan orang sukses (kaya), jelaskan?
- Apakah keadaan Bapak/Ibu sekarang karena dulu tidak serius untuk sekolah?
- Apa saja kendala Bapak/Ibu dalam menyekolahkan anak-anak (kendala diri dan kendala dari luar diri)?
- Apakah kendala-kendala tersebut membuat Bapak/Ibu menjadi tidak bersemangat dalam menyekolahkan anak, kalau tidak bagaimana Bapak/Ibu menyikapinya?

3. Internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial

- Apakah pengalaman hidup tidak dapat sekolah dengan baik mempengaruhi hidup Bapak/Ibu sekarang, kalau iya sebutkan (internalisasi)?
- Menurut Bapak/Ibu apakah pendidikan itu perlu atau penting, jelaskan?
- Apa pendapat Bapak/Ibu tentang arti pendidikan?
- Menurut Bapak / Ibu jenis pendidikan mana yang sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu sekarang, Apakah pendidikan negeri atau swasta, jelaskan?
- Menurut Bapak/Ibu pendidikan yang sekarang sudah memahami keadaan orang seperti bapak dan ibu!
- Pendidikan yang seperti apa yang Bapak/Ibu inginkan?

b. Perekam suara

Perekam suara ini digunakan untuk merekam proses wawancara, sangat penting untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengolahan data, sehingga tidak ada ucapan yang terlewatkan. Alat perekam suara yang peneliti gunakan adalah HP, dan kemudian dari hasil rekaman akan disajikan data verbatim (terlampir).

6. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menegelompokkan data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini tahapan analisis data kualitatif yang dipakai yaitu tahapan penelitian yang mengacu pada teori Miles, M.B. and Huberman, A.M¹⁰¹, yaitu sebagai berikut:

¹⁰¹ Miles, M.B. and Huberman, A.M, 2009, *Qualitative Data Analysis*, Thousand Oaks, CA : SAGE Publication

- a. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci, dan gagasan yang ada dalam data
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data
- c. sistem koding
- d. Analisis

7. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian yaitu:

1. Tahap persiapan

Langkah awal penelitian ini adalah menetapkan permasalahan penelitian dengan mengumpulkan dan mempelajari sejumlah literatur dari buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan topik masyarakat miskin dan pendidikan pada masyarakat miskin.. Menentukan subjek yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada teknik pengambilan sampel. Kemudian mempersiapkan instrumen yang akan digunakan untuk menunjang kelancaran dalam penelitian.

2. Tahap pengumpulan data

Pada proses tahapan ini peneliti mengumpulkan data melalui penuturan langsung dari subjek menggunakan metode wawancara dengan instrumen yang telah dipersiapkan yaitu pedoman wawancara. Pelaksanaan wawancara bulan Maret sampai September 2016. Peneliti juga mengamati dengan seksama kondisi lingkungan, perilaku subjek, dan peristiwa yang terjadi saat wawancara. Setelah wawancara selesai, maka data-data yang telah didapatkan langsung ditulis ulang dalam catatan wawancara. Tahapan pengumpulan data dokumentasi, peneliti melakukan sebelum wawancara dilaksanakan yaitu bulan Januari sampai Maret 2016. Sumber data dokumentasi adalah dari kantor Kecamatan Tampan dan dari kelurahan Tuah Karya

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap akhir penelitian ini data dari keseluruhan digolongkan, dianalisis dan dideskripsikan agar tergambar hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian menuturkan hasil temuan dari tema-tema yang telah dikaji kedalam bentuk tulisan yang mengurai secara garis besar makna-makna yang terkandung dari penelusuran perilaku minum alkohol pada mahasiswa yang telah dilakukan. Sehingga memudahkan pembaca untuk mengerti dan memahami hasil temuan yang didapatkan pada penelitian ini. Selanjutnya hasil penelitian ini siap untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.

Jenis data dalam ini adalah data lunak yaitu kata-kata baik yang diperoleh melalui data survey, wawancara, observasi dan data dokumentasi. Untuk meminimalisir kesalahan dalam penelitian ini menempuh tiga cara yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Reduksi data adalah proses memilih menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksi dan mengubah data kasar ke dalam catatan lapangan. Sajian data merupakan suatu cara merangkai data dalam suatu organisasi yang memudahkan untuk pembuatan kesimpulan dan atau tindakan yang diusulkan. Sedangkan verifikasi data adalah penjelasan tentang makna data dalam suatu konfigurasi yang secara jelas menunjukkan alur kausalnya sehingga dapat diajukan proposisi-proposisi yang terkait dengannya¹⁰². Berikut urutan analisa data penelitian:

¹⁰² *Ibid*, Reduksi data juga diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul,antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun

1. Penyusunan Data verbatim

Penyusunan Data Verbatim Data temuan lapangan penelitian kualitatif didokumentasikan dalam urutan tabel data (*data verbatim*) sehingga dapat disaring untuk ditentukan konsep subjek tentang variabel penelitian, dilakukan klasifikasi konsep, dikoding dan ditarik kesimpulan tertentu.

2. Memberikan Kode pada Data Verbatim

Pemberian Kode (*coding*) dimaksudkan agar data temuan lapangan dapat lebih mudah dimengerti, dianalisis dan diinterpretasikan guna penyelesaian penelitian lebih lanjut. Tahapan Koding dilakukan antara lain dengan cara pembuatan lembaran isian data, pemberian kode itu sendiri dapat berupa catatan reflektif (*keyword*, konsep inti), catatan pinggir (fenomena yang menarik) dan penyimpanan serta penyajian kembali data. Selanjutnya koding dilakukan dengan pembuatan kode pola antara lain jaringan sebab akibat/jsb, rechecking/rc, crosscek/crk, transformasi data/tr. Selama koding juga dibuat memo yang berfungsi untuk pengembangan preposisi dan kapentingan penyusunan label dan kategori.

3. Pemberian Label Data

Konstruk yang muncul dari pendapat informan diberikan label atau nama. Label diperoleh dari ciri atau atribut masing-masing konsep yang membedakan satu konstruksi dengan konstruksi lainnya.

4. Penyusunan Kategori

Berdasarkan label yang telah disusun dapat dilakukan pengelompokan konsep /label. Label yang memiliki kesamaan fokus dapat dimasukkan dalam satu kategori, sedangkan label yang memiliki perbedaan fokus dapat dimasukkan ke dalam kategori lainnya. Jika terdapat label dalam kategori baru yang muncul di luar fokus yang diteliti, kategori tersebut disimpan untuk ditelaah diakhir analisis dengan memberikan kemungkinan terdapatnya fenomena baru.

5. Penafsiran Data

Selanjutnya Teknik analisa data dilakukan sesuai dengan pendekatan deskriptif yang dikembangkan oleh Kerlinger pada tahun 2000 dengan menggunakan cara pengkodean dan ditabulasikan¹⁰³. Dalam *coding* akan dibantu dengan *content analysis* untuk mengkategorisasikan tipe data non verbal dan tipe data lainnya.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan kasus per kasus, yaitu fenomena yang sama dikaji proses dan hasilnya. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *within site analysis*, yaitu analisis yang ditujukan untuk mengetahui makna dari data yang diperoleh dalam penelitian lapangan. *Within site* berfokus pada penelitian deskriptif yakni memahami fenomena dengan mereduksi bagian-bagian yang penting saja serta terfokus pula pada penelitian penjelasan / *critical case sampling*.

¹⁰³ Kerlinger, F, N. 2000, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press